

Identifikasi Lokasi Penanaman Kembali **Ramin** (*Gonystylus bancanus* Kurz) di Hutan Rawa Gambut Sumatera dan Kalimantan



Kerjasama
Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi
dengan
International Tropical Timber Organization
(ITTO)-CITES Phase-2 Project

2013

**IDENTIFIKASI LOKASI
PENANAMAN KEMBALI RAMIN
(*Gonystylus bancanus* Kurz)
DI HUTAN RAWA GAMBUT
SUMATERA DAN KALIMANTAN**



Diterbitkan oleh:

FORDA PRESS

Bekerjasama dengan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

dan

International Tropical Timber Organization

(ITTO)-CITES Phase-2 Project



Technical Report Activities 1.1 and 1.2

**IDENTIFIKASI LOKASI PENANAMAN KEMBALI RAMIN
(*Gonystylus bancanus* Kurz) DI HUTAN RAWA GAMBUT
SUMATERA DAN KALIMANTAN**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Penyusun:

Siti Nurjanah, Dona Octavia dan Fitri Kusumadewi

Editor:

Tajudin Edy Komar

Reviewer :

Prof. Ris. Dr. Pratiwi, M.Sc.; Dr. Taulana Sukandi;

Dr. I Wayan Susi Dharmawan, S. Hut, M.Si.; dan Ir. Agustinus Tampubolon, M.Sc.

Penyiapan Ilustrasi dan Peta:

Nurul Ramdhania

Copyright © 2013 Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi, dengan International Tropical Timber Organization (ITTO)-CITES Phase 2 Project

Cetakan Pertama, November 2013

Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan

ix + 67 halaman; 178 x 250 mm

ISBN : 978-602-14274-4-6

Diterbitkan oleh:

FORDA PRESS

Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Telp.: +62251-7520093

Email: fordapress@yahoo.co.id

Bekerjasama dengan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi

Jl. Gunung Batu No.5 Bogor, Indonesia

Telp.: +62251-8633234, Fax.: +62251-8638111

Email: raminpd426@yahoo.co.id

dan/dibiayai oleh:

International Tropical Timber Organization (ITTO)-CITES
Phase-2 Project, 2013

SUMMARY

Ramin population has been predicted to be sufficient for their conservation and long term survival of this species in conservation areas in Sumatra and Kalimantan. However, various disturbances have threatened the remaining populations which have caused the population depleted and sharply declined, especially in other types of forest, such as in production forest areas. In order to conserve and restore ramin population, rehabilitation and replantation of ramin in its original habitats in Sumatra and Kalimantan, identification of suitable sites are necessary to be carried out. The sites could be in conservation and production forest areas which meet the requirement for ramin restoration and replantation, such as accessibility, suitability and security of the areas from conversion or other uses. The objective of this activity is to search suitable, accessible and secure sites for that purposes in five provinces as natural habitat of ramin in Riau, Jambi, South Sumatra, West and Central Kalimantan. The recommended sites for the rehabilitation and replantation of ramin were also made based on existing recent data and information, field survey, consultation with relevant stakeholders and the availability of ramin planting materials. The support of local government is also considered for the choosing of the sites. There are a number of potential locations for replantation of ramin. However, based on the above consideration, there are at least 5 sites are recommended for Sumatra, namely Hutan Wisata Sungai Dumai (Recreational Forest of Sungai Dumai) (Riau), Research Forest Areas of Lubuk Sakat (Riau), Protected Peatland of Sungai Buluh (Jambi) and Restricted Production Forest of Padamaran (South Sumatra). Areas in Kalimantan are City Forest of Sungai Raya (West Kalimantan) and Sebangau National Park (Central Kalimantan). Total areas for each recommended sites are large, but the rehabilitation and replantation of ramin could be ranged from 5-20 ha.

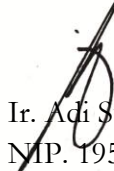
KATA PENGANTAR

Menurunnya potensi sumberdaya alam termasuk sumberdaya hutan di Indonesia telah menyebabkan semakin berkurangnya kontribusi terhadap penerimaan negara dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Penurunan potensi tersebut juga terjadi di hutan rawa gambut. Komoditas yang telah menurun sangat tajam adalah kayu yang dahulu merupakan salah satu primadona ekspor Indonesia.

Salah satu upaya untuk memulihkan kembali sumberdaya tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi habitat dan penanaman kembali berbagai jenis penghasil kayu tersebut. Dan, salah satu jenis yang tumbuh di hutan rawa gambut di Sumatera dan Kalimantan yang bernilai ekonomi tinggi adalah jenis ramin (*Gonystylus bancanus*). Namun demikian, pertumbuhan ramin sangat lambat dan pada awal pertumbuhan memerlukan pemeliharaan yang sangat intensif. Oleh sebab itu, penanaman kembali memerlukan komitmen jangka panjang oleh semua pihak untuk memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mengawali pencapaian tujuan tersebut, Badan Litbang Kehutanan bekerjasama dengan ITTO-CITES *project phase-2* (***The assessment of ramin plantation requirement and the establishment of ramin genetic resources conservation garden***”, khususnya ***Activity 1.1 dan 1.2***), telah melakukan identifikasi hutan rawa gambut terdeforestasi dan terdegradasi serta lokasi di hutan tersebut yang dianggap sesuai dan layak untuk penanaman kembali ramin. Beberapa pertimbangan dalam menentukan lokasi tersebut adalah status atau kepastian lokasi, kesesuaian lahan, aksesibilitas dan yang paling utama adalah komitmen jangka panjang dan dukungan secara terus menerus dalam upaya penanaman kembali ramin di masing-masing lokasi tersebut.

Kepala Pusat,



Ir. Adi Susmianto, M.Sc.

NIP. 19571221 198203 1 002

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengelola proyek mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah memberikan kontribusi dalam melaksanakan kegiatan ini mulai dari tahap persiapan sampai dengan tersusunnya laporan ini. Ucapan terima kasih tersebut ditujukan kepada Sdr. Fitri Kusumadewi untuk pengambilan data dan informasi dan kunjungan lapangan ke Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah, Dona Octavia untuk pengumpulan data dan kunjungan lapangan ke Provinsi Riau, Siti Nurjanah untuk pengambilan data dan informasi, kunjungan lapangan ke Provinsi Jambi dan Kalimantan Barat serta penyusunan draf laporan awal, Nurul Ramdhania untuk pembuatan ilustrasi dan peta serta setting serta beberapa pihak lain yang telah membantu dalam pembuatan dan penyelesaian draf akhir. Penghargaan juga disampaikan kepada para pencermat (*reviewers*) naskah dari awal sampai akhir, yaitu Prof. Dr. Pratiwi, Dr. Taulana Sukandi, Dr. I. Wayan Susi Dharmamawan, S. Hut, M.Si. dan beberapa yang lain seperti Ir. Agustinus Tampubolon, M.Sc. dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Berbagai kontribusi di atas secara nyata telah menyempurnakan laporan ini.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR DIAGRAM	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	4
1.3. Sasaran	4
1.4. Ruang Lingkup	4
II. METODE IDENTIFIKASI LOKASI	7
2.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan	8
2.2. Metode Pengumpulan Data	8
2.2.1. Pengumpulan Data Primer	8
2.2.2. Pengumpulan Data Sekunder	9
2.2.3. Validasi Data	10
2.3. Penetapan Lokasi untuk Peninjauan Lapangan	10
2.4. Peninjauan Lapangan	10
2.5. Penyajian Data	12
2.6. Penyusunan Prioritas Lokasi	12
2.7. Penentuan Lokasi yang Direkomendasikan	12
2.8. Kondisi Data dan Informasi	13
2.9. Pola Penanaman Kembali Ramin	13
III. HUTAN RAWA GAMBUT TERDEFORESTASI DAN TERDEGRADASI	15
3.1. Hutan Rawa Gambut Sumatera	17
3.1.1. Provinsi Riau	17
3.1.2. Provinsi Jambi	23
3.1.3. Provinsi Sumatera Selatan	28

3.2. Hutan Rawa Gambut Kalimantan	31
3.2.1. Provinsi Kalimantan Barat	32
3.2.2. Provinsi Kalimantan Tengah	38
IV. LOKASI POTENSIAL DAN AREAL YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK REHABILITASI RAMIN	43
4.1. Areal Potensial untuk Rehabilitasi Ramin di Sumatera	44
4.1.1. Provinsi Riau	45
4.1.2. Provinsi Jambi	47
4.1.3. Provinsi Sumatera Selatan	49
4.2. Areal Potensial untuk Rehabilitasi Ramin di Kalimantan	49
4.2.1. Provinsi Kalimantan Barat	49
4.2.2. Provinsi Kalimantan Tengah	51
V. AREAL YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK REHABILITASI RAMIN	55
5.1. Pulau Sumatera	57
5.1.1. Provinsi Riau	57
5.1.2. Provinsi Jambi	59
5.1.3. Provinsi Sumatera Selatan	60
5.2. Pulau Kalimantan	61
5.2.1. Kalimantan Barat	61
5.2.2. Kalimantan Tengah	62
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Ringkasan jenis data dan sumber data yang dikumpulkan	9
Tabel 2.	Sebaran luas kawasan bergambut di Provinsi Riau	18
Tabel 3.	Sebaran kawasan bergambut dan kekritisannya di Provinsi Riau	19
Tabel 4.	Permasalahan Kawasan Konservasi (KK) di Provinsi Riau	21
Tabel 5.	Daerah rawan pembalakan liar di Provinsi Riau, mulai sangat rawan (I) sampai ringan (III)	22
Tabel 6.	Sebaran luas kawasan bergambut di Provinsi Jambi	24
Tabel 7.	Sebaran kawasan bergambut dan kekritisannya di Provinsi Jambi	26
Tabel 8.	Sebaran luas kawasan bergambut di Provinsi Sumatera Selatan	29
Tabel 9.	Sebaran kawasan bergambut berdasarkan tingkat kerusakannya (kekritisannya) di Provinsi Sumatera Selatan	30
Tabel 10.	Sebaran luas kawasan bergambut di Provinsi Kalimantan Barat	33
Tabel 11.	Sebaran kawasan bergambut dan kekritisannya di Provinsi Kalimantan Barat	35
Tabel 12.	Luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat 2007-2010	37
Tabel 13.	Luas sebaran kawasan bergambut di Provinsi	38
Tabel 14.	Penyebaran hutan rawa gambut berdasarkan fungsi hutan di Kalimantan	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Sebaran hutan rawa gambut di Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi)	5
Gambar 2.	Sebaran hutan rawa gambut di Sumatera	16
Gambar 3.	Sebaran hutan rawa gambut di Provinsi Riau	20
Gambar 4.	Kondisi hutan rawa gambut di Provinsi Riau	23
Gambar 5.	Sebaran hutan rawa gambut di Provinsi Jambi	25
Gambar 6.	Kondisi hutan rawa gambut di Provinsi Jambi	27
Gambar 7.	Sebaran hutan rawa gambut di Provinsi Sumatera Selatan	28
Gambar 8.	Sebaran hutan rawa gambut di Provinsi Kalimantan Barat	34
Gambar 9.	Kondisi hutan rawa gambut di Provinsi Kalimantan Barat	32
Gambar 10.	Sebaran hutan rawa gambut di Provinsi Kalimantan Tengah	39
Gambar 11.	Pertumbuhan ramin di Provinsi	40
Gambar 12.	Lokasi yang direkomendasi untuk penanaman kembali ramin di Provinsi Riau	58
Gambar 13.	Lokasi yang direkomendasi untuk penanaman kembali ramin di Provinsi Jambi	59
Gambar 14.	Lokasi yang direkomendasi untuk penanaman kembali ramin di Provinsi Sumatera Selatan	60
Gambar 15.	Lokasi yang direkomendasi untuk penanaman kembali ramin di Provinsi Kalimantan Barat	62
Gambar 16.	Lokasi yang direkomendasi untuk penanaman kembali ramin di Provinsi Kalimantan Tengah	63

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.	Presentase sebaran luas kawasan bergambut di Provinsi Riau	19
Diagram 2.	Sebaran tingkat kekritisian kawasan bergambut di Provinsi Riau	20
Diagram 3.	Presentase sebaran kawasan bergambut di Provinsi Jambi	25
Diagram 4.	Sebaran tingkat kekritisian kawasan bergambut di Provinsi Jambi	27
Diagram 5.	Presentase sebaran kawasan bergambut di Provinsi Sumatera Selatan	30
Diagram 6.	Sebaran tingkat kekritisian kawasan bergambut di Provinsi Sumatera Selatan	31
Diagram 7.	Presentase kawasan bergambut di Provinsi Kalimantan Barat	34
Diagram 8.	Presentase sebaran kawasan bergambut di Provinsi Kalimantan Tengah	40

I. PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki hutan tropis terbesar kedua setelah Brazil dengan luas sekitar 133,3 juta ha. Dari luas hutan tersebut, sekitar 20,6 juta ha di antaranya adalah hutan rawa gambut. Dari hutan rawa gambut tersebut, sekitar 13 juta ha masih tetap berupa hutan rawa gambut dengan berbagai jenis pengelolaan seperti hutan produksi, kawasan konservasi, hutan lindung dan hutan untuk penggunaan lainnya atau Areal Penggunaan Lain (APL).

Hutan rawa gambut merupakan suatu ekosistem yang unik yang terbentuk dari akumulasi bahan organik yang berlangsung selama bertahun-tahun, disertai dengan genangan air dan tumbuhnya berbagai jenis vegetasi yang telah beradaptasi. Di dalam hutan rawa gambut (HRG) terdapat berbagai keanekaragaman hayati, termasuk berbagai jenis flora dan fauna. Keunikan ekosistem hutan rawa gambut tersebut menjadikan hutan rawa gambut sebagai ekosistem yang rentan “*fragile*”, mudah mengalami kerusakan akibat berbagai bentuk gangguan seperti konversi, pembalakan liar, perambahan dan kebakaran hutan yang berlangsung secara berulang. Hutan rawa gambut yang telah mengalami kerusakan dan gangguan sangat sulit untuk pulih baik secara alamiah maupun buatan melalui rehabilitasi dan restorasi ke dalam bentuk asli dan kondisi awalnya.

Berbagai jenis vegetasi (jenis flora) tumbuh di hutan rawa gambut Indonesia. Salah satu kelompok jenis tersebut adalah ramin yang berasal dari genus *Gonystylus*. Ramin dari jenis *Gonystylus bancanus* tumbuh secara alami di hutan rawa gambut di beberapa provinsi di Sumatera, yaitu di Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan dan di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah (Air Shaw 1972, Soerianegara dan Lemmens 1994, dan Sidiyasa 2005 dalam Komar 2005). Ramin dari *G. bancanus* merupakan salah satu jenis kayu yang bernilai ekonomi tinggi, memiliki kayu yang berwarna terang dan pengerjaan yang relatif mudah. Nilai ekonomi ini menyebabkan, jenis ini dieksploitasi besar-besaran. Akibat eksploitasi tersebut, populasi ramin terus menurun dan bahkan di beberapa tempat populasi ramin telah terfragmentasi dan bahkan hilang.

Sekitar tahun 1980-an, hutan rawa gambut mulai dieksploitasi secara besar-besaran. Kurang lebih 200 HPH dengan luas konsesi sekitar 13 juta ha mendapatkan ijin perusahaan untuk menebang berbagai jenis kayu yang terdapat di hutan rawa gambut, termasuk jenis ramin. Namun sebagai akibat eksploitasi tersebut dan berbagai gangguan lainnya pada akhir dekade 1990-an, produksi kayu dari hutan rawa gambut terus menurun. Bahkan, perusahaan yang memiliki ijin pengelolaan meninggalkan areal-areal hutan rawa gambut yang telah terbuka yang akhirnya menjadi areal yang terlantar, baik yang telah mengalami degradasi ringan sampai berat. Hutan-hutan rawa gambut yang telah terdegradasi berat sebagian besar telah dikonversi ke penggunaan lain (non-kehutanan). Degradasi hutan yang terjadi tidak hanya menurunkan produktivitas hutan tetapi juga telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan baik pada skala lokal maupun global. Salah satu masalah lingkungan yang utama adalah kebakaran hutan dan alih fungsi hutan rawa gambut menjadi hutan produksi, lahan pertanian ataupun perkebunan yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati di hutan rawa gambut.

Degradasi yang terjadi di hutan rawa gambut umumnya mengarah pada kerusakan permanen. Degradasi ditandai dengan berkurang atau hilangnya tutupan oleh berbagai jenis vegetasi di areal tersebut. Berkurangnya vegetasi akan menurunkan nilai ekonomi di hutan rawa gambut tersebut yang diperkirakan bernilai cukup besar. Nilai ekonomi ini berasal dari berbagai jenis flora dan fauna, terutama dari jenis-jenis kayu komersial dan bernilai ekonomi tinggi seperti ramin (*G. bancanus*).

Penurunan populasi dan produksi kayu ramin akibat eksploitasi tersebut cukup signifikan, dari 665.000 m³ pada tahun 1994 turun menjadi 131.000 m³ pada tahun 2000 (Soehartono dan Mardiasuti 2002). Penurunan ini terutama disebabkan proses pertumbuhan yang lambat, regenerasi alami yang terbatas, pembalakan liar, cara pemanenan yang tidak berkesinambungan dan adanya berbagai gangguan seperti kebakaran hutan rawa gambut yang terjadi secara berulang.

Ramin diperkirakan masih dapat dijumpai dengan populasi yang relatif besar di berbagai kawasan konservasi seperti di Taman Nasional, hutan lindung, cagar alam dan areal-areal lainnya. Untuk mencegah terus menurunnya populasi dan punahnya ramin di habitat aslinya, berbagai tindakan harus

dilakukan. Salah satunya adalah dengan mendorong kegiatan penanaman kembali ramin dan rehabilitasi hutan rawa gambut sebagai habitat ramin. Untuk mendukung kegiatan penanaman maupun restorasi populasi maka diperlukan kegiatan identifikasi lokasi untuk rehabilitasi dan penanaman kembali ramin di habitat aslinya.

1.2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi terdegradasi dan terdeforestasi di Sumatera dan Kalimantan untuk penanaman kembali ramin di hutan rawa gambut, baik di hutan produksi, kawasan konservasi dan kawasan lainnya.

1.3. Sasaran

Memperoleh informasi tentang lokasi dan luas hutan rawa gambut terdegradasi dan terdeforestasi di Sumatera dan Kalimantan untuk rehabilitasi dan penanaman kembali ramin di habitat aslinya.

1.4. Ruang Lingkup

Kegiatan identifikasi ini dilakukan di tiga provinsi di Sumatera dan dua provinsi di Kalimantan yang diketahui merupakan habitat alami ramin di Sumatera yaitu Riau, Jambi dan Sumatera Selatan, sedangkan di Kalimantan yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Proses identifikasi lokasi (areal) hutan rawa gambut terdegradasi dan terdeforestasi ini menggunakan data sekunder dan peta dari instansi-instansi terkait serta peninjauan lapangan di beberapa lokasi yang dianggap sesuai untuk penanaman kembali ramin.



Gambar 1. Sebaran hutan rawa gambut di Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua)

Rencana Aksi Restorasi, Rehabilitasi, dan Penanaman (Peta Jalan Menuju Pengelolaan Ramin, 2011)

1. Mengembangkan teknologi untuk restorasi hutan rawa gambut seperti membuat tabat (*canal blocking*) untuk mengembalikan tingkat permukaan air sebagai prasyarat untuk keberhasilan penanaman.
2. Mengidentifikasi daerah-daerah prioritas untuk kegiatan restorasi dan rehabilitasi.
3. Menyediakan benih/bibit ramin berkualitas tinggi untuk kegiatan penanaman.
4. Meningkatkan kemampuan dan kesadaran tentang pentingnya restorasi dan rehabilitasi hutan rawa gambut dan ramin.
5. Meningkatkan kemampuan dan kesadaran tentang pentingnya restorasi dan rehabilitasi hutan rawa gambut dan ramin.
6. Melakukan berbagai penelitian dan pengembangan untuk mendukung restorasi, rehabilitasi dan penanaman ramin.

Sumber : Komar, 2011. *Peta Jalan Menuju Pengelolaan Ramin*. Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam- ITTO

II. METODE IDENTIFIKASI LOKASI



2.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan identifikasi ini dilaksanakan di hutan rawa gambut di tiga provinsi di Sumatera dan dua provinsi di Kalimantan yang berdasarkan informasi yang tersedia merupakan habitat alami ramin, yaitu Riau, Jambi dan Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Hutan rawa gambut di Sumatera berada di pantai timur Sumatera yang terbentang mulai dari utara ke selatan. Sedangkan di Kalimantan hutan rawa gambut tersebar relatif merata di Kalimantan Barat dan Tengah, mulai dari dataran rendah di bagian selatan sampai ke bagian tengah pulau tersebut. Pengumpulan data dan informasi mengenai lokasi tersebut mulai dari persiapan sampai dengan penyusunan laporan ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Juni 2013.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui pengumpulan dokumen dan peta yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Kabupaten, Kota dan sumber lainnya serta kunjungan lapangan. Peninjauan (kunjungan) lapangan dilakukan untuk lokasi-lokasi tertentu yang berdasarkan informasi yang diperoleh sebelumnya dapat dijadikan lokasi (areal) untuk penanaman kembali ramin atau rehabilitasi hutan rawa gambut.

2.2.1. Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung melalui tatap muka dan kunjungan lapangan. Wawancara merupakan pendalaman, validasi dan verifikasi dari data sekunder yang telah diambil sebelumnya. Dalam diskusi berbagai usulan dari instansi terkait tentang hutan rawa gambut dan rencana rehabilitasi ramin juga dipertimbangkan. Semula penelusuran data dilakukan melalui kuisisioner, namun di dalam pelaksanaannya pengisian kuisisioner untuk pengumpulan data mengenai lokasi dan luas areal untuk penanaman kembali ramin tidak dikembalikan sehingga data dan informasi yang diharapkan tidak diperoleh. Hal ini terutama disebabkan data dan informasi yang dikehendaki tidak tersaji di dalam rencana kerja dan laporan tahunan.

Berikut ini adalah ringkasan jenis, metode dan sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini.

Tabel 1. Ringkasan jenis data dan sumber data yang dikumpulkan

Hierarki Administrasi	Target Data	Jenis dan Sumber Data
Tingkat Nasional	Informasi luasan total areal hutan terdegradasi & terdeforestasi tingkat nasional	Dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan (BAPLAN), bahan pustaka dan peta nasional
Tingkat Provinsi	Informasi luasan dan letak areal hutan rawa gambut terdegradasi & terdeforestasi di tingkat provinsi	Dokumen-dokumen yang ada di tingkat provinsi, peta, Laporan tahunan Gubernur/Dinas Kehutanan Provinsi
Tingkat Kabupaten/Kota dan kunjungan lapangan	Informasi lokasi dan luasan hutan rawa gambut terdegradasi dan deforestasi di tingkat kabupaten/kota Informasi awal tentang status kawasan, aksesibilitas, kesesuaian lahan, kondisi keamanan, tenaga kerja; serta informasi dukungan pemerintah daerah terhadap rehabilitasi dan penanaman ramin dan sejarah vegetasi awal	Dokumen-dokumen yang diterbitkan di tingkat kabupaten/kota dan peta kabupaten/kota Laporan pertanggungjawaban Bupati/Walikota Data dan informasi yang dikumpulkan secara langsung dengan wawancara dan pengecekan lapangan

2.2.2. Pengumpulan Data Sekunder

Data yang digunakan dalam identifikasi ini merupakan data luasan dan lokasi di areal hutan rawa gambut terdegradasi dan terdeforestasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Data tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen dan peta yang dikeluarkan oleh berbagai pihak terkait dengan hutan rawa gambut dan ramin. Data tersebut diperoleh dengan melakukan kunjungan ke berbagai instansi terkait terutama BPDAS di daerah, penelusuran data melalui internet dan beberapa sumber lain. Data sekunder

tingkat kabupaten/kota secara lebih rinci diperoleh dengan kunjungan langsung kepada pemilik/sumber data dan wawancara tatap muka dengan berbagai pihak yang memiliki data primer.

2.2.3. Validasi Data

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi mencakup data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan terutama dari Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2011, Penghitungan Deforestasi Indonesia Periode 2009 – 2011, Laporan Tahunan dan Publikasi lainnya, Dinas Kehutanan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta instansi pemerintah lainnya. Data dan informasi lainnya diperoleh melalui wawancara, pencermatan dan kunjungan lapangan. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan hutan rawa gambut dan rehabilitasi juga digunakan sebagai informasi pelengkap seperti data vegetasi, kesesuaian lahan, dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan rehabilitasi dan jaminan keberlangsungan setelah rehabilitasi dan penanaman kembali dilakukan.

2.3. Penetapan Lokasi untuk Peninjauan Lapangan

Data dan informasi tentang luasan, letak/lokasi, kondisi di masing-masing lokasi yang diperoleh selanjutnya dicermati. Hasil pencermatan digunakan dalam pemilihan lokasi untuk peninjauan lapangan. Pada saat peninjauan lapangan beberapa data dan informasi seperti status kawasan, aksesibilitas, kesesuaian lahan, jaminan keamanan, tingkat kerusakan dan komitmen pemerintah daerah atau instansi setempat dalam kegiatan rehabilitasi dan penanaman kembali ramin dikumpulkan. Data dan informasi ini bersifat subjektif dan kualitatif dari masing-masing aspek di atas, sementara analisis secara khusus tidak dilakukan. Penentuan lokasi didasarkan atas berbagai pertimbangan di atas dan pengalaman di beberapa lokasi lain termasuk atas dasar masukan dari berbagai pihak dalam berbagai diskusi pembahasan.

2.4. Peninjauan Lapangan

Beberapa aspek berikut dikumpulkan pada saat peninjauan lapangan, yaitu:

Status Kawasan Hutan (Areal Hutan); yaitu status hukum kawasan atau hutan rawa gambut untuk penanaman kembali ramin, potensi konflik dengan masyarakat, dengan badan usaha dan lain-lain.

Aksesibilitas; yaitu informasi tentang tingkat kemudahan mencapai lokasi, seperti moda transportasi yang digunakan, jarak dengan kota terdekat dan waktu tempuh serta kondisi umum infrastruktur jalan. Aksesibilitas mempengaruhi kelancaran kegiatan penanaman mulai dari kegiatan pengangkutan bibit, penanaman, pemeliharaan, monitoring dan mobilitas. Mobilitas juga mempengaruhi biaya keseluruhan kegiatan.

Jaminan Keamanan; yaitu informasi tentang ada tidaknya potensi konflik, kemungkinan perambahan, terjadinya kebakaran dan pengambilalihan lokasi untuk penggunaan lain.

Kesesuaian Lahan; yaitu informasi tentang kesesuaian lokasi yang akan ditanami kembali dengan ramin, terutama berdasarkan informasi keberadaan ramin yang ada sebelumnya di areal tersebut. Meskipun demikian untuk finalisasi lokasi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Tingkat Kerusakan; yaitu informasi tentang kerusakan (tingkat kekritisian) hutan rawa gambut yang akan ditanami kembali dengan ramin. Tingkat kerusakan menggambarkan kondisi tutupan hutan rawa gambut mulai dari lahan rawa gambut terbuka sampai dengan hutan rawa gambut sekunder dan atau hutan rawa gambut dengan kondisi vegetasi yang masih utuh.

Sejarah Vegetasi; yaitu informasi tentang keberadaan ramin dan jenis vegetasi yang ada sebelumnya. Informasi ini sangat diperlukan untuk memperkirakan kesesuaian lahan dan menduga tingkat perubahan yang terjadi akibat berbagai gangguan dari waktu ke waktu.

Informasi Kegiatan Rehabilitasi; yaitu informasi ada atau tidak adanya kegiatan rehabilitasi sebelumnya dan yang akan datang sangat diperlukan untuk mengantisipasi keberlanjutan kegiatan penanaman kembali ramin di areal tersebut.

Dukungan Pemerintah; Informasi mengenai adanya dukungan atau komitmen pemerintah setempat atau instansi terkait mengenai penanaman kembali ramin sangat diperlukan. Hal ini terutama disebabkan penanaman

kembali ramin membutuhkan waktu yang sangat panjang, biaya yang sangat besar dengan tingkat keberhasilan yang relatif kecil sehingga membutuhkan komitmen jangka panjang.

2.5. Penyajian Data

Data dan informasi yang telah dianalisis ditampilkan dalam bentuk spasial (peta) dan non spasial. Data non spasial yang disampaikan adalah berupa luasan (ha) dan lokasi yang potensial untuk penyelamatan, konservasi dan penanaman kembali dengan jenis ramin.

Lokasi potensial untuk penyelamatan dan konservasi ramin adalah lokasi yang berdasarkan informasi yang tersedia menunjukkan bahwa lokasi tersebut merupakan areal atau habitat alami ramin, namun secara teknis masih memerlukan prakondisi untuk ditanami kembali dengan ramin. Kendala teknis tersebut antara lain adanya konflik lahan, perambahan, pembalakan, lokasi yang sangat rawan kebakaran dan rencana penggunaan lain (APL). Sedangkan lokasi yang direkomendasikan adalah lokasi yang potensial dan relatif layak berdasarkan pertimbangan dari berbagai aspek seperti disebut di atas.

2.6. Penyusunan Prioritas Lokasi

Penyusunan prioritas lokasi dilakukan berdasarkan hal-hal di atas. Semula penentuan prioritas ditentukan dengan sistem peringkat atau skoring. Namun data dan informasi yang dapat dikumpulkan pada saat kunjungan lapangan sangat terbatas sehingga sistem peringkat dan skoring tidak dapat dilakukan. Penentuan prioritas lokasi dilakukan atas pertimbangan objektif dari aspek-aspek di atas dan masukan dari berbagai pihak pada saat diskusi akhir.

2.7. Penentuan Lokasi yang Direkomendasikan

Area yang direkomendasikan untuk rehabilitasi ramin adalah areal yang secara spesifik dapat dilakukan penanaman kembali saat ini apabila bibit ramin tersedia. Beberapa lokasi yang direkomendasikan untuk direhabilitasi dengan jenis ramin terdiri dari 1 atau 2 lokasi untuk masing-masing provinsi dengan

informasi yang lebih detail. Lokasi yang direkomendasikan untuk ramin tidak secara khusus memasukkan kawasan konservasi plasma nutfah di areal hak pengelolaan, koridor sepanjang sungai dan areal-areal lain yang tidak mungkin untuk dilaksanakan.

2.8. Kondisi Data dan Informasi

Data dan informasi yang terdapat dalam laporan ini dianggap paling tepat saat ini. Dalam beberapa hal data dan informasi tersebut dapat berubah dengan sangat cepat sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Hal-hal yang dapat berubah dengan cepat antara lain kondisi vegetasi (tutupan lahan) yang dapat hilang dalam seketika akibat kebakaran lahan (hutan), konflik kepemilikan, penguasaan dan perambahan oleh masyarakat setempat, termasuk pembalakan liar. Hal-hal di atas dapat menyebabkan lokasi yang direkomendasikan menjadi tidak sesuai lagi untuk ramin. Oleh karena itu diperlukan verifikasi lokasi rehabilitasi/penanaman ramin berupa kunjungan kembali ke lokasi-lokasi tersebut.

Data dan informasi yang terdapat di berbagai instansi umumnya tersedia tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan untuk penanaman kembali ramin. Sedangkan kemampuan untuk pengumpulan data lapangan secara intensif dan detail sangat terbatas. Untuk tahap ini data dan informasi yang disampaikan hanya berupa indikatif mengenai lokasi-lokasi yang dianggap sesuai untuk penanaman kembali ramin apabila bahan tanaman (bibit) yang tersedia dan mencukupi.

Hal lain yang menjadi hambatan dalam menyusun rekomendasi lokasi adalah data dan informasi yang tersedia sangat terbatas, kurang akurat, atau telah berubah akibat perubahan kondisi lapangan. Pengukuran tingkat ketebalan dan kematangan gambut tidak dilakukan. Namun sejarah vegetasi di lokasi tersebut digunakan sebagai pertimbangan untuk menilai kesesuaian ramin di lokasi tersebut.

2.9. Pola Penanaman Kembali Ramin

Rekomendasi lokasi untuk penanaman kembali ramin merupakan lokasi yang dianggap paling sesuai berdasarkan berbagai pertimbangan terutama dari

aspek-aspek di atas. Bentuk, pola dan rancangan penanaman kembali ramin tersebut sangat ditentukan oleh kondisi spesifik dari masing-masing lokasi dan tujuan penanaman. Dalam laporan ini bentuk dan tujuan penanaman kembali tidak dibahas secara khusus.

III. HUTAN RAWA GAMBUT TERDEFORESTASI DAN TERDEGRADASI



Hutan rawa gambut merupakan salah satu tipe hutan tropis yang ada di Indonesia dan merupakan sumberdaya alam yang unik dan mempunyai fungsi hidrologi dan lingkungan yang sangat penting bagi berbagai kehidupan. Hutan rawa gambut terbentuk dari akumulasi berbagai bahan organik, kelimpahan air dan berbagai vegetasi yang hidup dan telah beradaptasi dengan air berkadar asam tinggi (pH rendah). Luas lahan rawa gambut di Indonesia diperkirakan 20,6 juta ha atau sekitar 10,8 % dari luas daratan Indonesia. Dari luasan tersebut sekitar 7,2 juta ha terdapat di Pulau Sumatera dan 4.7 juta ha di Kalimantan (Wahyunto *et al.*, 2005) yang membentang dari utara provinsi Aceh, Sumatera Utara sampai dengan provinsi Lampung di bagian selatan. Sebaran lahan gambut terluas di Sumatera terdapat di Provinsi Riau (4.043.000 ha), Sumatera Selatan (1.483.000 ha) dan Jambi (716.000 ha) . Sebaran lahan rawa gambut di Kalimantan adalah di Kalimantan Barat (1.729.000 ha) dan Kalimantan Tengah (3.070.000 ha). Ramin umumnya ditemui di hutan rawa gambut di dataran rendah hingga menengah yang tidak terendam, ketinggian tempat sekitar < 300 m dari permukaan laut dan dengan ketebalan gambut yang relatif tebal.



Gambar 2. Sebaran hutan rawa gambut di Sumatera

Kebijakan pengelolaan hutan rawa gambut (HRG) di Indonesia telah dimulai sejak awal 1980-an dengan berbagai bentuk konsesi hutan. Berbagai kebijakan tersebut telah menyisakan dampak negatif terhadap sumberdaya alam saat ini, meski telah memberikan berbagai manfaat ekonomi. Penyebabnya antara lain adalah pengelolaan hutan yang belum tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar secara liar dan tidak memenuhi kaedah kelestarian, pembalakan liar, perambahan, okupasi lahan dan kebakaran. Deforestasi dan degradasi hutan rawa gambut mulai meningkat cepat pada kurun waktu 1990-an. Rata-rata tahunan laju deforestasi lahan gambut di Sumatera dari tahun 1990 ke tahun 2000-an meningkat dari 4,6% ke 5,2% dengan penurunan tutupan lahan hutan rawa gambut lebih dari 60% dan hampir 85% dari seluruh lahan gambut terdeforestasi tersebut berubah menjadi areal perkebunan dan hutan sekunder (Miettinen *et al.*, 2011). Demikian juga halnya dengan hutan rawa gambut di Kalimantan.

3.1. Hutan Rawa Gambut Sumatera

3.1.1. Provinsi Riau

Pada dekade terakhir, hutan rawa gambut yang ada di Provinsi Riau telah mengalami deforestasi dan degradasi yang cukup tinggi. Provinsi ini kehilangan lebih dari 9.000 km² hutan rawa gambut pada priode ini. Pada tahun 2010 hutan rawa gambut di Provinsi Riau hanya tinggal 36% dari total hutan rawa gambut yang ada di provinsi Riau.

Provinsi Riau dengan luas wilayah daratan dan perairan seluas $\pm 107.923,71$ km² terdiri atas 10 kabupaten dan 2 kota. Luas daratan mencapai 85.987.570 km² (8.598.757 ha) yang sebagian besar adalah hutan, termasuk hutan rawa gambut. Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor andalan pembangunan Provinsi Riau, yaitu hampir 70% tergantung pada manfaat, fungsi dan keberadaan hutan, baik hutan rawa gambut maupun non rawa gambut.

Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki sebaran kawasan gambut terluas di Pulau Sumatera. Kawasan bergambut di Provinsi Riau terdapat di 9 kabupaten dan 2 kota, hanya 1 kabupaten di Provinsi Riau yang tidak memiliki kawasan bergambut (Tabel 2). Kawasan bergambut di Riau mencapai luas

3,94 juta ha dengan kondisi mulai dari kondisi yang relatif baik, kritis sampai dengan sangat kritis. Kriteria tingkat kekritisan adalah berdasarkan PerMenhut II No. 12 Tahun 2012.

Kawasan bergambut di luar kawasan hutan lebih luas dibandingkan dengan di dalam kawasan hutan. Hutan rawa gambut di dalam kawasan hutan terdapat di dalam kawasan konservasi (223.213,33 ha), hutan lindung (12.689,52 ha) dan hutan produksi (1.924.202,87 ha). Sedangkan gambut yang berada di luar kawasan hutan terbagi menjadi kawasan budidaya (1.790.257,62 ha) dan di kawasan lindung (475,51 ha) (Tabel 2).

Tabel 2. Sebaran luas kawasan bergambut di Provinsi Riau

No	Kabupaten/ Kota	Dalam Kawasan (ha)			Luar Kawasan (ha)		Total (ha)
		HK	HL	HP	KB	KL	
1	Indragiri Hulu	67.362,92	-	66.840,12	96.270,29	94,51	230.567,84
2	Indragiri Hilir	-	10.055,26	241.788,17	719.316,48	381,01	971.540,92
3	Pelalawan	31.400,81	-	420.589,97	212.782,53	-	664.773,31
4	Kampar	383,21	-	52.339,06	69.828,24	-	122.550,51
5	Siak	61.584,16	-	282.102,47	145.421,32	-	489.107,95
6	Bengkalis	54.456,45	-	318.078,56	148.173,67	-	520.708,68
7	Dumai	3.133,75	-	118.992,82	29.467,49	-	151.594,06
8	Pekanbaru	-	-	231,02	3.641,48	-	3.872,50
9	Rokan Hulu	-	-	18.109,35	35.339,93	-	53.449,28
10	Rokan Hilir	-	-	251.234,37	159.407,85	-	410.642,22
11	Kep. Meranti	4.892,04	1.955,67	153.896,80	160.641,94	-	321.386,45
Total (ha)		223.213,34	12.010,93	1.924.202,71	1.780.291,22	475,52	3.940.193,72

Keterangan : HL (Hutan Lindung), KK (Kawasan Konservasi), HP (Hutan Produksi), KB (Kawasan Budidaya), KL (Kawasan Lindung).

Sumber: RTk – RHL BPDAS Indragiri Rokan Tahun 2011 (data hasil olahan)

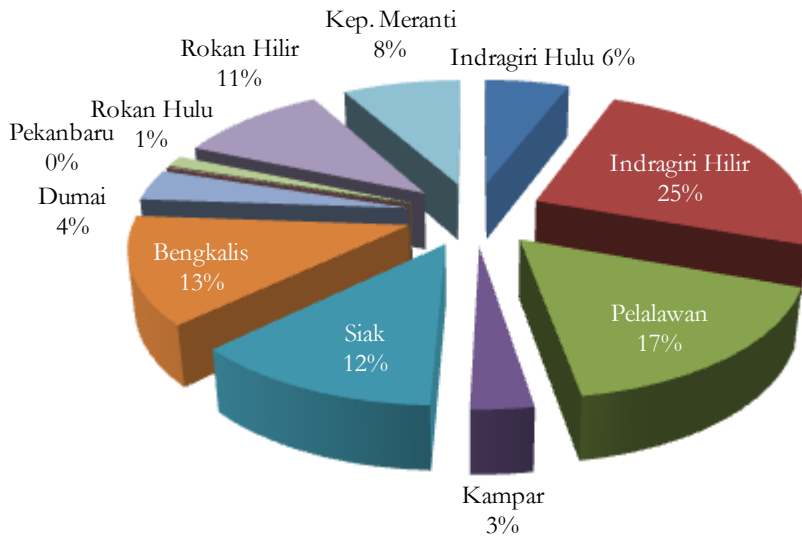


Diagram 1. Presentase sebaran luas kawasan bergambut di Provinsi Riau

Pada tahun 1982 sesuai dengan Tata Guna Hutan Kepakatan (TGHK), kawasan hutan di Provinsi Riau dialokasikan seluas 6,4 juta ha, tetapi saat ini hutan alam yang tersisa hanya 1,2 juta ha (Dinhut Riau, 2011). Sebaran kawasan bergambut di Provinsi Riau dan kondisi kekritisannya disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Sebaran kawasan bergambut dan kekritisannya di Provinsi Riau

No.	Kabupaten/ Kota	Luasan Kawasan Bergambut (ha)	Kritis (ha)	Sangat Kritis (ha)	Tidak Kritis (ha)
1	Indragiri Hulu	230.567	220.815	0,58	9.750
2	Indragiri Hilir	971.540	961.735	-	9.803
3	Pelalawan	664.772	643.791	-	30.783
4	Kampar	122.549	121.211	16,27	1.320
5	Siak	489.107	483.738	-	15.329
6	Bengkalis	520.708	397.894	-	859
7	Dumai	151.593	151.532	-	10
8	Rokan Hilir	410.642	410.616	-	35
9	Rokan Hulu	464.090	43.464	-	82
10	Pekanbaru	3.872	3.620	-	252
11	Kep. Meranti	321.386	321.386	-	-

Sumber : RTk – RHL BPDAS Indragiri Rokan Tahun 2011 (data hasil olahan)

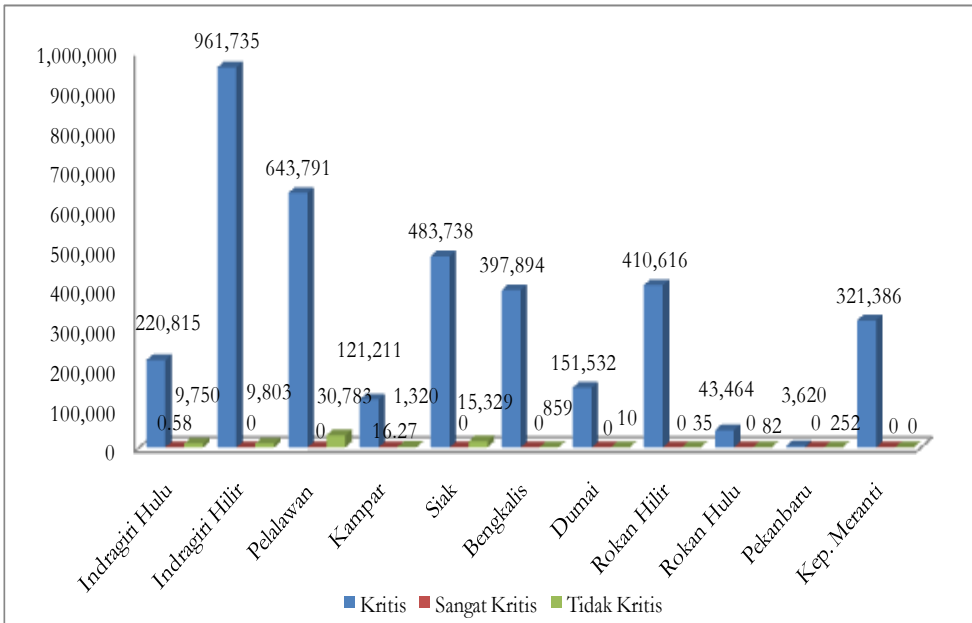
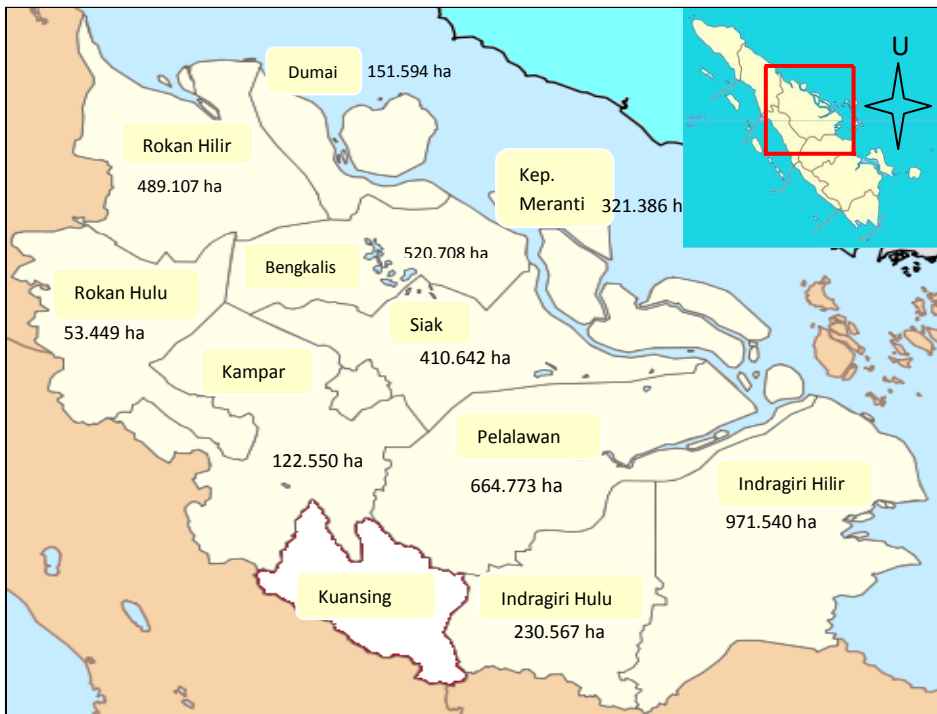


Diagram 2. Sebaran tingkat kekritisan kawasan bergambut di Provinsi Riau



Gambar 3. Sebaran hutan rawa gambut di Provinsi Riau

Masalah yang terjadi di hutan rawa gambut di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau adalah ketidaksesuaian cara pengelolaan, alih fungsi yang tidak sesuai dengan aspek kelestarian lingkungan, perambahan, pembalakan liar dan kebakaran hutan. Masalah-masalah ini yang menyebabkan terus terjadinya deforestasi dan degradasi hutan rawa gambut di provinsi ini. Permasalahan secara spesifik di masing-masing kawasan konservasi di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Permasalahan Kawasan Konservasi (KK) di Provinsi Riau

No.	Nama KK	Lokasi (Kabupaten)	Permasalahan
1.	SM Kerumutan (120.000 ha)	Pelalawan, Indragiri hulu, Indragiri Hilir	Pencurian kayu
2.	Pembukaan Lahan Gambut (PLG) Duri	Bengkalis	Perambahan, pembukaan lahan, belum dikukuhkan
3.	SM Tasik Besar Tasik Metas (3.200 ha)	Pelalawan	Pencurian kayu
4.	SM Tasik Belat (2.529 ha)	Bengkalis	Pencurian kayu
5.	SM Giam Siak Kecil (50.000 ha)	Siak	Pemukiman dlm kawasan, pembalakan liar
6.	SM Tasik Serkap Tasik Sarang Burung (6.900 ha)	Pelalawan	Pencurian kayu, belum ditata batas
7.	SM Danau Pulau Besar (28.237,95 ha)	Siak	Pembalakan liar
8.	SM Balai Raja (18.000 ha)	Bengkalis	Pembalakan, pembukaan kebun, tumpang tindih
9.	SM Bukit Batu (21.500 ha)	Bengkalis	Pembalakan liar
10.	SM Bukit Rimbang Bukit Baling (136.000 ha)	Kampar Kuantan Singingi	Pemukiman dlm kawasan, pembalakan liar, perambahan
11.	SM Tasik Tanjung Pandang (4.925 ha)	Bengkalis	Pencurian kayu
12.	CA Bukit Bungkok (20.000 ha)	Kampar	Pencurian kayu/belum dikukuhkan
13.	CA Pulau Berkey (8.279,9 ha)	Rokan Hilir	Pencurian kayu/belum dikukuhkan
14.	HW Sungai Dumai (4.700 ha)	Dumai	Perambahan

Keterangan: SM = Suaka Margasatwa, CA = Cagar Alam, HW= Hutan Wisata

Sumber: BKSDA Riau, 2007 dalam SLHD Riau, 2008

Masalah pembalakan liar juga sangat banyak terjadi dan belum dapat diatasi secara tuntas. Tingkat kerawanan hutan rawa gambut terutama pembalakan liar di kabupaten-kabupaten di Provinsi Riau berdasarkan data dari Dinhut Provinsi Riau seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Daerah rawan pembalakan liar di Provinsi Riau, mulai sangat rawan (I) sampai ringan (III)

No.	Nama Kabupaten	Rawan I	Rawan II	Rawan III
1.	Rokan Hilir	Pamipahan	Bagan Siapi-api	--
2.	Rokan Hulu	Sungai Daun, Maharo, Bukit Suligi	--	--
3.	Bengkalis	Rangau, Bukit Kerikil, P. Rupal, Siak Kecil	--	P.Padang, Bukit Batu, Siak Kecil
4.	Dumai	Sei Hulu Ala	--	--
5.	Pelalawan	Tesso Nilo, Teluk Meranti	Kaiti Kubu, Pauh	--
6.	Kuantan Singingi	Tesso Nilo	Kaiti Kubu, Pauh, Rimbang, Baling	--
7.	Kampar	Tesso Nilo	Kaiti Kubu, Pauh	Batang Lipai Siabu, Lipat kain
8.	Indragiri Hulu	Punti Anai	--	Keritang
9.	Indragiri Hilir	Sei Gaung	--	Keritang
10.	Siak	--	--	D. Pulau Besar-Pulau Bawah

Sumber: Dinas Kehutanan Prop. Riau, 2006 *dalam* SLHD Riau, 2008

Provinsi Riau merupakan provinsi dengan habitat asli ramin terluas dan terbanyak di Sumatera, khususnya yang terletak di Danau Bawah, Pulau Besar, dan kawasan Giam Siak Kecil. Namun dengan adanya berbagai ancaman seperti disebut di atas habitat tersebut dapat secara cepat musnah dan hancur, demikian pula dengan populasi ramin yang masih ada saat ini.



Gambar 4. Kondisi hutan rawa gambut di Provinsi Riau

3.1.2. Provinsi Jambi

Secara geografis, Provinsi Jambi terletak di antara 00 74'– 20 46,16' Lintang Selatan dan 1010 12' – 1040 44' Bujur Timur, berbatasan langsung dengan Provinsi Riau di sebelah utara dan dengan Provinsi Sumatera Selatan di bagian selatan. Luas wilayah Provinsi Jambi tercatat 53.435,92 km² yang terbagi atas luas daratan 48.989,98 km² (5.335.500 ha) yang terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota dan luas lautan 4.445,94 km².

Luas kawasan hutan dan perairan di Provinsi Jambi adalah 2.179.440 ha atau sekitar 42,73% dari total luas Provinsi Jambi (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 421/Kpts/II/1999 tanggal 15 Juni 1999). Kawasan hutan tersebut terdiri dari kawasan konservasi (seluas 676.120 ha), hutan lindung (seluas 191.130 ha), dan hutan produksi (seluas 1.312.190 ha) dan areal penggunaan lain (APL) (seluas 3.156.060 ha).

Luas kawasan hutan rawa gambut di Provinsi Jambi mencapai 736.227,20 ha atau sekitar 14% dari luas provinsi yang tersebar di 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur (seluas 311.992,10 ha), Kabupaten Muaro Jambi (seluas 229.703,90 ha), Kabupaten Tanjung Jabung Barat (seluas 154.598 ha), Kabupaten Sarolangun (seluas 33.294,2 ha), Kabupaten Merangin seluas 5.809,8 ha dan Kabupaten Tebo (seluas 829,2 ha).

Kawasan bergambut di Provinsi Jambi yang berada di luar kawasan hutan lebih besar daripada yang terletak di kawasan hutan. Hutan rawa gambut yang berada dalam kawasan hutan, yaitu kawasan konservasi (154.338,40 ha), hutan lindung (39.943,30) dan hutan produksi (155.269,80 ha). Sedangkan gambut yang berada diluar kawasan hutan yang merupakan kawasan budidaya seluas 386.675,70 ha. Sebaran luas kawasan bergambut di dalam kawasan hutan dan diluar kawasan hutan disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Sebaran luas kawasan bergambut di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/ Kota	Dalam Kawasan (ha)			Luar Kawasan (ha)	Total (ha)
		KK	HL	HP	KB	
1	Tanjung Jabung Timur	105.088,30	22.519,50	40.545,70	143.838,60	311.992,10
2	Muaro Jambi	49.250,10	4.313,30	72.984,90	103.155,60	229.703,90
3	Tanjung Jabung Barat	-	13.110,50	41.739,20	99.748,30	154.598,00
4	Sarolangun	-	-	-	33.294,20	33.295,20
5	Merangin	-	-	-	5.809,80	5.809,80
6	Tebo	-	-	-	829,20	829,20
Total (ha)		154.338,40	39.943,30	155.268,80	383.676,70	736.228,20

Keterangan : HL (Hutan Lindung), KK (Kawasan Konservasi), HP (Hutan Produksi), KB (Kawasan Budidaya)

Sumber : RTk – RHL BPDAS Batanghari Tahun 2012 (data hasil olahan)

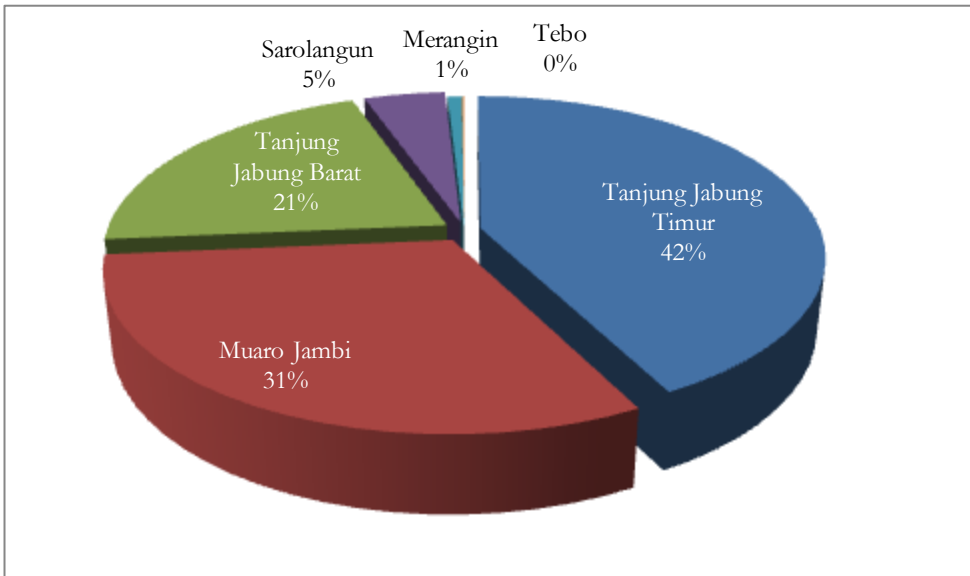
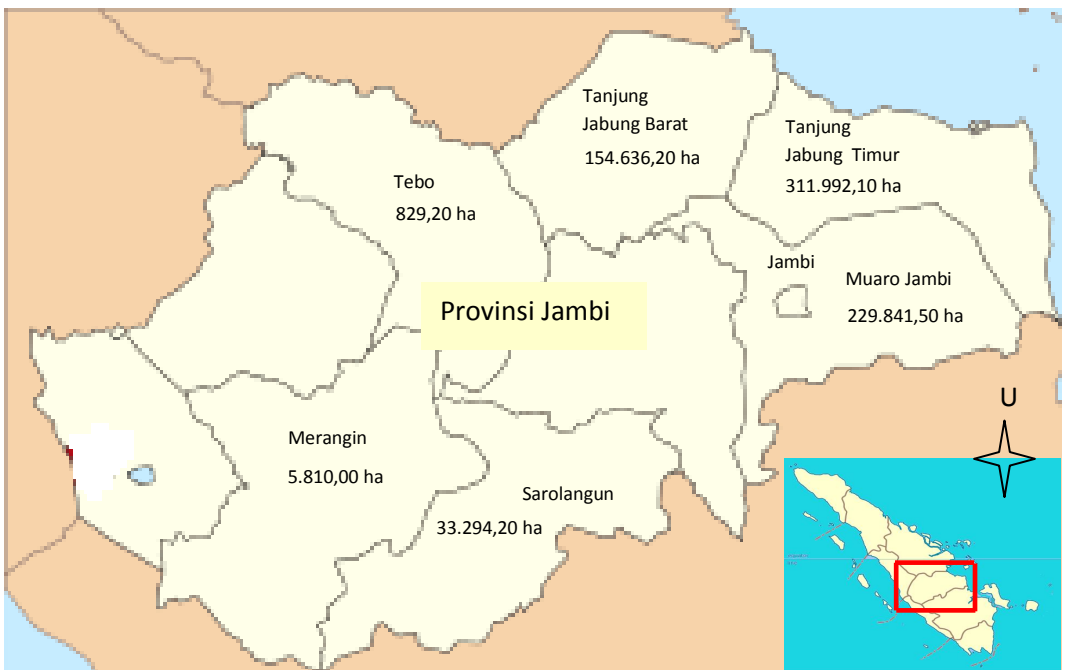


Diagram 3. Presentase sebaran kawasan bergambut di Provinsi Jambi



Gambar 5. Sebaran hutan rawa gambut di Provinsi Jambi

Sebagian besar kawasan hutan rawa gambut di Jambi telah berubah menjadi semak belukar, ladang, tegalan dan bahkan menjadi areal terbuka yang tidak produktif. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan fungsi kawasan meliputi areal seluas 184.057,7 ha atau 25% dari total luas kawasan gambut. Penggunaan kawasan untuk budidaya adalah seluas 116.481,10 ha (63,29%) dan kawasan hutan seluas 67.576,6 ha (36,71%). Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan serta pengelolaan yang kurang tepat menyebabkan semakin meluasnya lahan kritis dan semakin rusaknya ekosistem gambut. Sebaran kawasan gambut yang mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat kerusakan di Provinsi Jambi disajikan dalam Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Sebaran kawasan bergambut dan kekritisannya di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/ Kota	Luasan Kawasan Bergambut (ha)	Kritis (ha)	Sangat Kritis (ha)	Agak Kritis (ha)	Tidak Kritis (ha)
1	Tanjung Jabung Timur	311.816,10	36.353,20	40.923,90	127.617,50	106.921,50
2	Muaro Jambi	229.841,50	16.324,20	52.016,20	73.174,20	88.326,90
3	Tanjung Jabung Barat	154.636,20	6.710,50	35.365,90	62.986,30	49.573,50
4	Sarolangun	33.294,20	27,00	3.641,60	19.279,00	10.346,60
5	Merangin	5.810,00	-	980,00	2.694,50	2.135,50
6	Tebo	829,20	-	-	829,20	-
Total (ha)		736.227,20	59.414,90	132.927,60	286.580,70	257.304

Sumber : RTk – RHL BPDAS Batanghari Tahun 2012 (data hasil olahan)

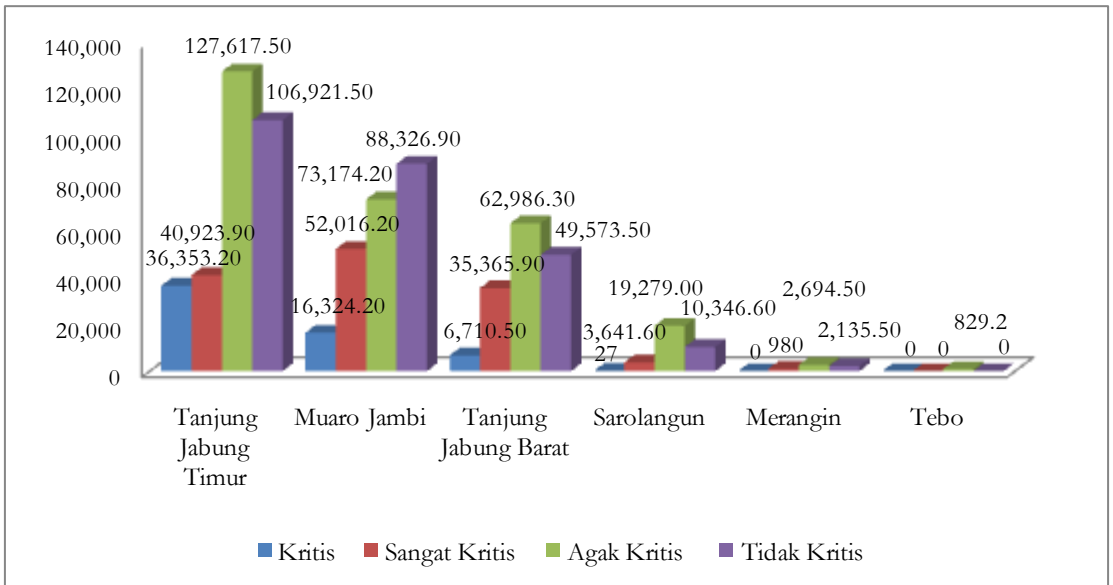


Diagram 4. Sebaran tingkat kekritisan kawasan bergambut di Provinsi Jambi

Pada Tabel 7 terlihat bahwa luas kawasan hutan rawa gambut di Provinsi Jambi yang berada pada kondisi kritis adalah 8,07%, kondisi sangat kritis adalah 18,05%, kondisi agak kritis adalah 38,93% dan relatif baik (tidak kritis) sekitar 34,95%. Kawasan gambut dalam kondisi agak kritis akan menjadi kritis bahkan sangat kritis apabila tidak dikelola dengan baik dan tidak ada intervensi pencegahan degradasi hutan. Kawasan gambut relatif baik (tidak kritis) terluas berada di Sistem Dome Gambut (SDG) Petaling di Taman Nasional Berbak.



Gambar 6. Kondisi hutan rawa gambut di Provinsi Jambi

3.1.3. Provinsi Sumatera Selatan

Secara geografis, Provinsi Sumatera Selatan terletak di antara 5010²- 1020⁷ Lintang Selatan dan 1010 40⁷ – 1060 30⁷ Bujur Timur. Luas wilayah provinsi ini tercatat sekitar 86.431,32 km² yang terbagi atas luas daratan sebesar 10.925.400 ha yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota. Provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah utara, Kepulauan Bangka Belitung di bagian timur, Provinsi Lampung di sebelah selatan dan Provinsi Bengkulu di sebelah barat.



Gambar 7. Sebaran hutan rawa gambut di Provinsi Sumatera Selatan

Luas kawasan hutan dan perairan adalah 4.416.837 ha atau 40.43% dari luas provinsi (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001). Berdasarkan hasil tata batas pengukuhan hutan yang dilakukan sampai dengan tahun 2008, kawasan hutan di provinsi ini

mengalami perubahan menjadi 3.760.662 ha, yang terdiri dari kawasan konservasi seluas 711.778 ha (18,93%), hutan lindung seluas 558.609 ha (14,85%) dan hutan produksi seluas 2.490.275 ha (66,22%).

Sumatera Selatan mengalami deforestasi cukup tinggi selama dekade 1990-an yang mengakibatkan penurunan tutupan hutan rawa gambut di Sumatera Selatan dari 62% menjadi hanya sekitar 16%. Penurunan ini juga disebabkan oleh kebakaran hutan yang terjadi di tahun 1997 -1998.

Luas kawasan bergambut di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 1.374.556,19 ha yang tersebar di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 697.866,68 ha, Kabupaten Banyuasin seluas 317.042,73 ha, Kabupaten Muara Banyuasin seluas 274.207,50 ha, Kabupaten Muara Enim seluas 45.214,58 ha dan Kabupaten Musi Rawas seluas 40.224,70 ha.

Kawasan bergambut berada di kawasan hutan lebih luas daripada yang terletak di luar kawasan hutan. Gambut yang berada dalam kawasan hutan, yaitu Kawasan konservasi (75.760,71 ha), hutan lindung (39.668,90 ha) dan hutan produksi (767.343,25 ha). Sedangkan gambut yang berada di kawasan APL (Areal Penggunaan Lain) seluas 491.783,33 ha. Sebaran luas kawasan bergambut di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8. Sebaran luas kawasan bergambut di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Fungsi Kawasan (ha)				Total (ha)
		KK	HL	HP	APL	
1	Ogan Komering Ilir	12.675,35	26.660,45	522.142,86	136.388,02	697.866,68
2	Banyuasin	61.978,40	13.008,45	46.834,24	195.221,64	317.042,73
3	Musi Banyuasin	1.106,96	-	170.502,33	102.598,21	274.207,50
4	Muara Enim	-	-	17.521,81	27.692,77	45.214,58
5	Musi Rawas	-	-	10.342,01	29.882,69	40.224,70
Total (ha)		75.760,71	39.668,90	767.343,25	491.783,33	1.374.556,19

Keterangan : HL (Hutan Lindung), KK (Kawasan Konservasi), HP (Hutan Produksi), APL (Areal Penggunaan Lain).

Sumber: diolah dari berbagai sumber

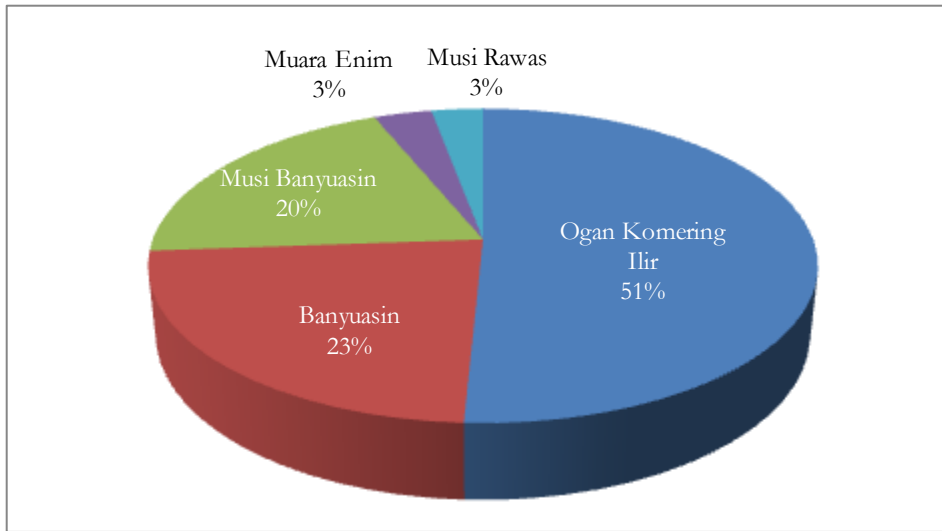


Diagram 5. Presentase sebaran kawasan bergambut di Provinsi Sumatera Selatan

Kawasan bergambut yang kritis semakin bertambah akibat tidak ada pengelolaan dan pencegahan degradasi hutan. Sebaran kawasan gambut yang mengalami kekritisian di Provinsi Sumatera Selatan disajikan dalam Tabel 9. berikut.

Tabel 9. Sebaran kawasan bergambut berdasarkan tingkat kerusakannya (kekritisian) di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Luasan Kawasan Bergambut (ha)	Kritis (Ha)	Sangat Kritis (Ha)	Tidak Kritis (Ha)
1	Ogan Komering Ilir	697.866,68	574.091,54	99.368,85	24.406,29
2	Banyuasin	317.042,73	197.265,49	1.700,23	118.077,01
3	Musi Banyuasin	274.207,50	202.819,70	3.448,70	67.939,10
4	Muara Enim	45.214,58	45.112,05	102,53	-
5	Muara Rawas	40.224,70	39.531,89	620,46	72,35
Total (ha)		1.374.536,19	1.058.820,67	105.240,77	210.494,75

Pada Tabel 9 terlihat bahwa luas kawasan gambut di Provinsi Sumatera Selatan telah mengalami kondisi kritis sekitar 77,03%, berada dalam kondisi sangat kritis sekitar 7,66% dan hanya sedikit yang berada dalam keadaan relatif baik (tidak kritis) yaitu sekitar 15,31%.

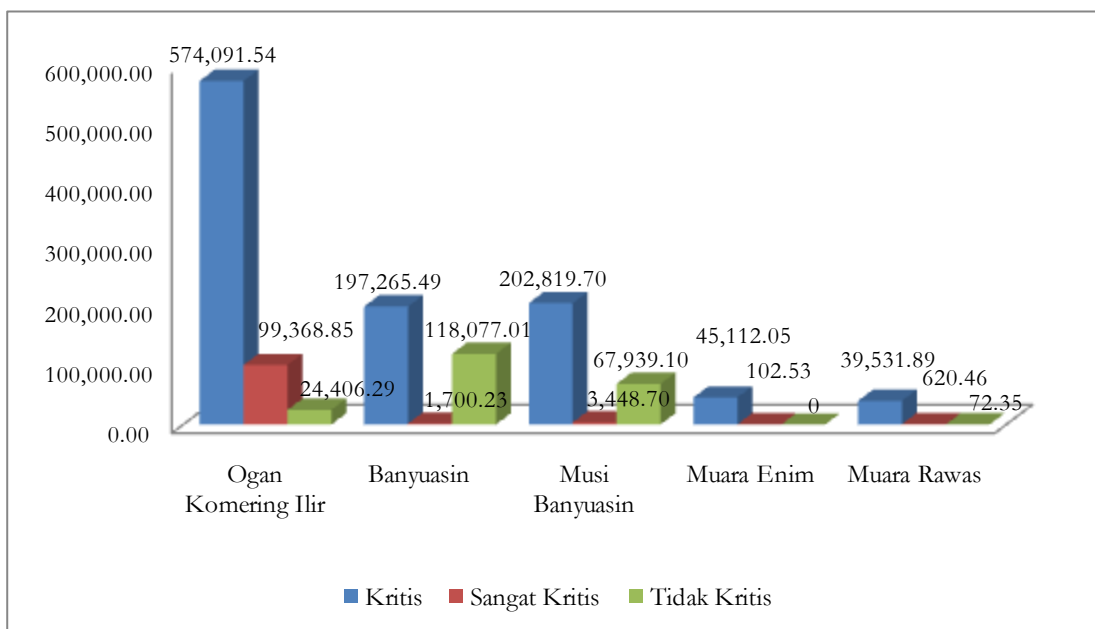


Diagram 6. Sebaran tingkat kekritisan kawasan bergambut di Provinsi Sumatera Selatan

3.2. Hutan Rawa Gambut Kalimantan

Berdasarkan hasil inventarisasi berbasis teknologi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis, luas hutan rawa gambut di Kalimantan adalah 5,76 juta ha, dengan penyebaran di daerah Kalimantan Barat seluas 10,729 juta ha, Kalimantan Tengah seluas 3.010 juta ha, Kalimantan Selatan seluas 0,331 juta ha dan Kalimantan Timur seluas 0,697 ha (BPDAS 2011). Hutan rawa gambut di Kalimantan sebagian besar menempati dataran rendah gambut dan kubah yang terbentang pada cekungan luas antara sungai-sungai besar. Hutan rawa gambut ini merupakan habitat ramin terbesar di Kalimantan dengan berbagai kondisi habitat, kedalaman gambut dan bentuk pengelolaan.

3.2.1. Provinsi Kalimantan Barat

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara 2o08' LU serta 3005' LS serta di antara 108o0' BT dan 114o10' BT. Provinsi ini terletak membentang tepat di tengah garis khatulistiwa (garis lintang 0o), ibu kota provinsi ini, Pontianak, berada tepat di tengah garis tersebut. Hal ini menjadikan Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah tropis dengan suhu udara dan kelembaban tinggi sepanjang tahun.



Gambar 8.
Kondisi hutan rawa gambut di Provinsi Kalimantan Barat

Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas setelah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, yaitu

sekitar 6,39% dari luas kawasan hutan di Indonesia. Luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat adalah 9.178.760 ha atau \pm 61,73% dari total luas Provinsi Kalimantan Barat (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000). Kawasan hutan terdiri dari kawasan konservasi seluas 1.645.580 ha, hutan lindung seluas 2.307.045 ha, hutan produksi seluas 5.226.135 ha dan areal penggunaan lain (APL) seluas 5.689.940 ha. Di dalam hutan lindung tersebut terdapat hutan rawa gambut dengan luas sekitar 126.130 ha.

Luas lahan gambut di Provinsi Kalimantan Barat seluas 1.749.780,30 ha atau 11,87% dari luas wilayah provinsi. Hutan atau lahan rawa gambut tersebut tersebar di 12 kabupaten dan 2 kota seperti pada Tabel 10. Luas hutan rawa gambut di dalam kawasan hutan lebih besar dibandingkan dengan di luar

kawasan hutan. Gambut yang berada di dalam kawasan hutan terdiri dari hutan konservasi (seluas 114.317,72 ha), hutan lindung (seluas 130.729,79 ha) dan hutan produksi (seluas 857.654,96 ha). Sedangkan gambut yang berada di luar kawasan hutan yang merupakan kawasan budidaya seluas 343.397,88 ha dan kawasan lindung seluas 296.224,68 ha. Sebaran luas kawasan bergambut di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10. Sebaran luas kawasan bergambut di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Kabupaten/Kota	Fungsi Lahan					Total (ha)
		Dalam Kawasan (ha)			Luar Kawasan (ha)		
		KK	HL	HP	KB	KL	
1	Kab. Bengkayang	-	-	20.938,63	7.595,00	12.487,37	41.021,00
2	Kab. Kapuas Hulu	90.351,25	10.785,89	182.789,93	129.865,33	5.524,39	419.316,78
3	Kab. Kayong Utara	19.396,43	35.262,86	74.601,72	12.827,47	21.042,97	163.131,44
4	Kab. Ketapang	1.475,83	20.275,79	224.193,87	46.431,19	50.844,62	343.221,31
5	Kota Pontianak	-	-	-	398,38	-	398,38
6	Kota Singkawang	-	-	3.217,09	3.037,99	3.323,96	9.579,03
7	Kab. Kuburaya	-	61.961,41	174.424,36	59.099,42	118.016,44	413.501,62
8	Kab. Landak	71,80	1.510,07	24.355,69	26.696,23	22.420,63	75.054,41
9	Kab. Melawi	-	-	-	-	1.398,62	1.398,62
10	Kab. Pontianak	-	-	46.949,75	5.559,72	18.377,56	70.887,03
11	Kab. Sambas	3.022,41	114,16	56.433,66	16.962,06	26.236,46	102.768,75
12	Kab. Sanggau	-	819,62	49.045,45	10.843,28	1.049,13	61.757,48
13	Kab. Sekadau	-	-	704,81	4.665,74	816,36	6.186,91
14	Kab. Sintang	-	-	-	19.416,08	14.686,19	34.102,27
Total (ha)		114.317,72	130.729,79	857.654,96	343.397,88	296.224,68	1.742.325,03

Keterangan : HL (Hutan Lindung), KK (Kawasan Konservasi), HP (Hutan Produksi), KB (Kawasan Budidaya)

Sumber : RTk – RHL BPDAS Kapuas Tahun 2011 (data hasil olahan)

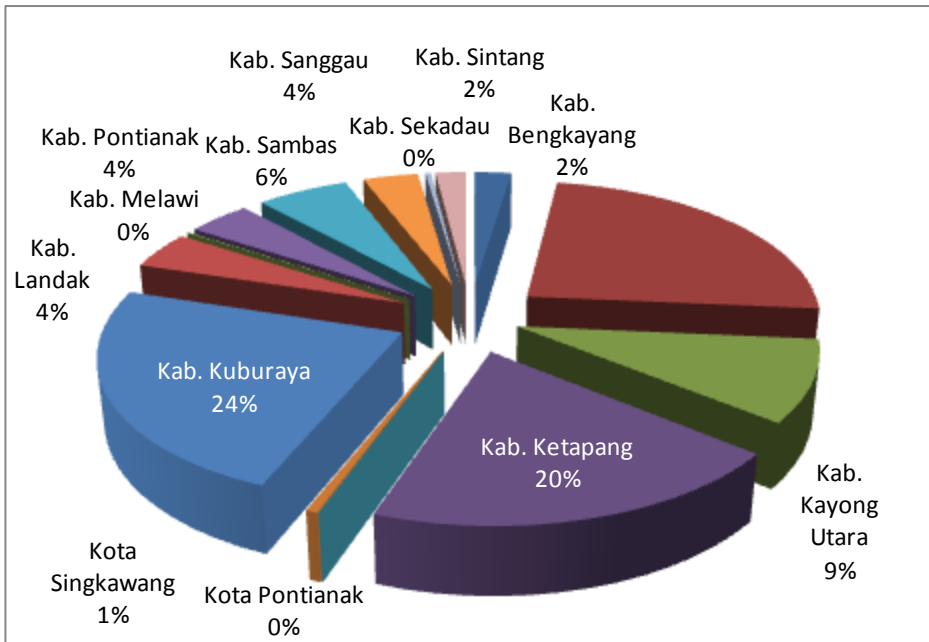


Diagram 7. Presentase kawasan bergambut di Provinsi Kalimantan Barat



Gambar 9. Sebaran hutan rawa gambut di Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi ini memiliki lima kawasan hutan lindung gambut yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas 1.732,14 ha, Kabupaten Kayong Utara dengan luas 3.4246,71 ha, Kabupaten Ketapang dengan luas 20.902,45 ha, Kabupaten Kubu Raya dengan luas 58.522,74 ha dan Kabupaten Landak dengan luas 1.093,62 ha.

Hutan rawa gambut di Provinsi Kalimantan Barat secara umum sudah berubah menjadi hutan rawa sekunder atau bekas tebangan. Hanya seluas 21.848,06 ha (1,74%) yang masih merupakan hutan rawa gambut primer yang terdapat di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kubu Raya (14.196,39 ha) dan Kabupaten Kapuas Hulu (7.651,67 ha) (BPDAS Kapuas, 2011). Sisanya umumnya adalah kawasan gambut yang telah berubah menjadi semak belukar, ladang, tegalan atau bahkan areal terbuka. Berbagai gangguan telah menyebabkan semakin luasnya kerusakan ekosistem gambut dan lahan kritis sebagaimana disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Sebaran kawasan bergambut dan kekritisannya di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Kabupaten/Kota	Luasan Kawasan Bergambut (ha)	Tingkat Kekritisan Gambut		
			Tidak Kritis (ha)	Kritis (ha)	Sangat Kritis(ha)
1	Bengkayang	41.066,87	-	40.464,36	602,51
2	Kapuas Hulu	421.559,02	600,48	382.321,15	38.637,40
3	Kayong Utara	163.959,56	0,28	156.114,91	7.844,37
4	Ketapang	344.511,15	-	305.726,12	38.785,03
5	Kota Pontianak	398,38	-	398,38	-
6	Kota Singkawang	9.579,03	-	9.439,84	139,20
7	Kuburaya	414.392,50	10.503,85	370.120,77	33.767,88
8	Landak	75.108,97	-	73.665,15	1.443,82
9	Melawi	1.398,62	-	1.398,62	-
10	Pontianak	70.889,09	-	69.170,20	1.718,89
11	Sambas	102.806,11	-	99.055,93	3.750,18
12	Sanggau	61.931,95	-	59.888,64	2.043,31
13	Sekadau	6.192,03	-	6.133,65	58,38
14	Sintang	34.107,40	-	33.394,66	712,74
Luas (ha)		1.747.900,68	11.104,61	1.607.292,38	129.503,69

Sumber : RTk – RHL BPDAS Kapuas Tahun 2011 (data hasil olahan)

Pada Tabel 11. terlihat bahwa luas kawasan gambut dengan kondisi kritis di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 91,96% dan bahkan sangat kritis seluas 7,41%. Hanya 0,64% yang berada dalam kondisi relatif baik. Kawasan gambut dalam kondisi agak kritis akan menjadi kritis bahkan sangat kritis apabila pencegahan tidak segera dilakukan dan pengelolaan tidak diperbaiki termasuk dengan kegiatan rehabilitasi dan restorasi ekosistem. Kawasan gambut yang relatif luas dengan kondisi relatif baik hanya di Kabupaten Kuburaya.

Di dalam kawasan hutan lindung gambut di Provinsi Kalimantan Barat juga terdapat kawasan yang telah berubah menjadi lahan terbuka, semak belukar, ladang atau tegalan, sawah bahkan perkebunan. Sebagian besar (980,50 ha atau 56,61%) Hutan Lindung Gambut di Kabupaten Kapuas Hulu juga telah berubah menjadi semak belukar, semak belukar-rawa, lahan terbuka dan tegalan atau ladang. Kabupaten Kayong Utara sekitar (2.824,50 ha atau 8,25%) dari luas arealnya berubah menjadi semak belukar, semak belukar rawa, lahan terbuka, perkebunan dan sawah. Di Kabupaten Ketapang seluas 12.336,70 ha atau 59,02% dari luas arealnya juga telah berubah menjadi semak belukar, semak belukar rawa dan lahan terbuka. Sedangkan di Kabupaten Kubu Raya sekitar 6.016,70 ha atau 10,28% dari luas arealnya telah berubah menjadi semak belukar, semak belukar rawa, lahan terbuka, perkebunan dan sawah.

Beberapa permasalahan yang terdapat di kawasan hutan rawa gambut di sini adalah disamping kondisinya yang telah rusak akibat pengelolaan yang kurang tepat dan alih fungsi yang tidak sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan, termasuk kebakaran hutan, pembalakan liar dan perambahan.

Masalah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat mulai meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan penduduk terhadap kawasan hutan. Data kebakaran hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2007 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat 2007-2010

No	Lokasi (Daerah Operasi)	Luas Areal Kebakaran (ha)				Total (ha)
		2007	2008	2009	2010	
1	Pontianak	69,00	446,50	428,00	105,35	1.048,85
2	Ketapang	4,50	9,50	641,82	0,00	655,82
3	Singkawang	28,80	94,00	327,88	0,00	450,68
4	Sintang	496,00	0,00	848,00	47,57	1.391,57
5	Semitau	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50
Total		636,80	550,00	2.245,70	152,92	3.5875,42

Sumber: BKSDA Provinsi Kalbar dalam BPKH Wilayah III (2011)

Kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan cukup tajam dan mencapai luas 1.695,70 ha. Tahun 2008 mencapai luas 550 ha dan tahun 2009 mencapai luas 2.245,70 ha, tetapi mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2010 yaitu hanya 152,92 ha. Daerah yang memiliki intensitas kebakaran cukup tinggi adalah Sintang yang meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi. Di daerah ini banyak terdapat areal perkebunan, perladangan dan pertanian rakyat yang sebagian di antaranya melakukan pembersihan lahan dengan pembakaran (BPKH III, 2011). Pembalakan liar merupakan salah satu masalah utama yang terjadi di Kalimantan Barat, terutama penebangan kayu ramin. Pembalakan liar di provinsi ini sudah berlangsung sejak lama dan belum berhasil dikendalikan. Pembalakan liar terjadi terutama di perbatasan dengan Serawak, Malaysia, yang merupakan jalur kayu ilegal ke luar Indonesia.

Konflik penggunaan lahan dan pemanfaatan hutan juga merupakan salah satu isu di Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu penyebab konflik tersebut adalah adanya perbedaan penafsiran fungsi hutan yang terjadi akibat perbedaan dasar yang digunakan dalam menentukan status dan fungsi hutan tersebut. BPKH Wilayah III Pontianak telah melakukan identifikasi tata batas di lapangan sampai dengan tahun 2010. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya areal perkebunan yang sudah mendapatkan ijin usahanya terindikasi tumpang tindih dengan kawasan hutan. Tumpang tindih kawasan perkebunan juga banyak

terjadi di kawasan hutan produksi dan kawasan pertambangan dengan kawasan hutan produksi terbatas. Tumpang tindih kawasan hutan bergambut juga terjadi baik untuk kawasan perkebunan maupun pertambangan di atas kawasan hutan produksi.

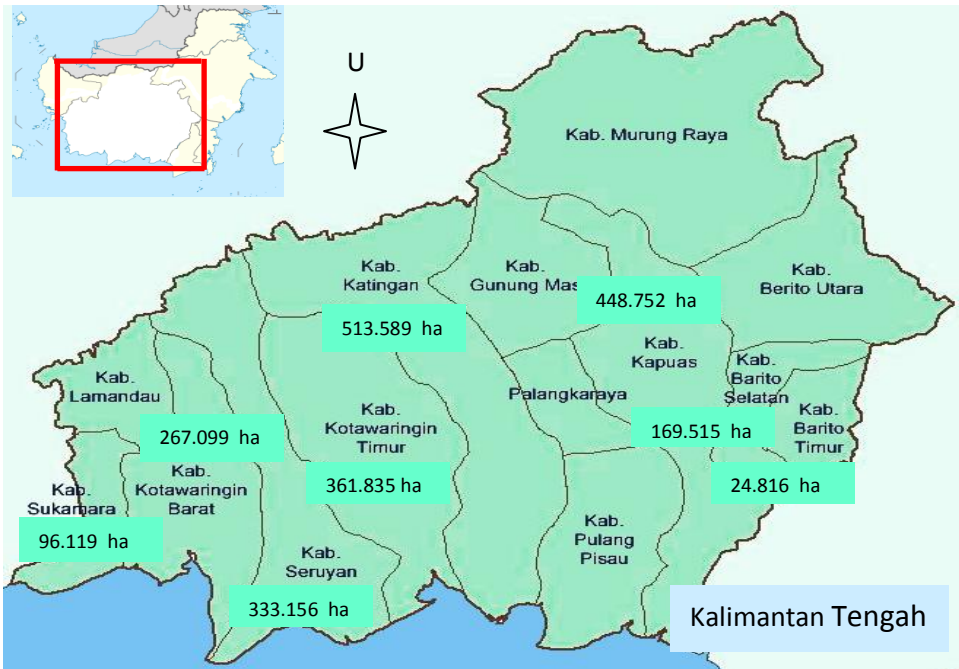
3.2.2. Provinsi Kalimantan Tengah

Kawasan bergambut di Kalimantan Tengah dijumpai di sepanjang pantai selatan menuju kearah daratan antara sungai-sungai Mentaya, Kahayan, Kapuas dan Barito. Lahan gambut tersebut tersebar di sembilan wilayah kabupaten, seperti pada Tabel 13. Areal hutan rawa gambut terluas terdapat di Kahayan Hilir dengan luas areal 795.579 ha dan Katingan dengan luas 513.589 ha (Wahyunto dan Bambang 2005 *dalam* RTk-RHL BPDAS Kahayan 2011).

Tabel 13. Luas sebaran kawasan bergambut di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Luasan Kawasan Bergambut (ha)
1	Barito Selatan	169.515
2	Barito Timur	24.816
3	Kahayan Hilir	795.579
4	Kotawaringin Barat	267.099
5	Kotawaringin Timur	361.835
6	Kapuas	448.752
7	Katingan	513.589
8	Seruya	333.156
9	Sukamara	96.119
Luas (ha)		3.010.460

Sumber : RTK - RHL BPDAS Kahayan Tahun 2011



Gambar 10. Sebaran hutan rawa gambut di Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 14. Penyebaran hutan rawa gambut berdasarkan fungsi hutan di Kalimantan Tengah wilayah kerja BPDAS Kahayan

No.	Kabupaten/Kota	Fungsi Hutan		Jumlah (ha)
		Hutan Konservasi (ha)	Hutan Produksi (ha)	
1.	Kab. Gunung Mas	-	43,23	43,23
2.	Kab. Kapuas	-	40.475,76	40.475,76
3.	Kab. Katingan	287.822,69	207.375,21	495.197,90
4.	Kab. Kotawaringin Barat	136.011,03	140.669,63	276.680,66
5.	Kab. Kotawaringin Timur	-	334.298,71	334.298,71
6.	Kab. Lamandau	-	571,22	571,22
7.	Kab. Pulang Pisau	163.043,54	111.445,53	274.489,06
8.	Kab. Seruyan	55.976,40	254.819,53	310.795,93
9.	Kab. Sukamara	11.268,55	91.365,46	102.634,01
10.	Kota Palangkaraya	31.371,11	54.864,54	86.235,65
11.	Kab. Barito Selatan	-	293,50	293,50
Total		685.493,32	1.236.222,32	1.921.715,63

Sumber : RTK - RHL BPDAS Kahayan Tahun 2011

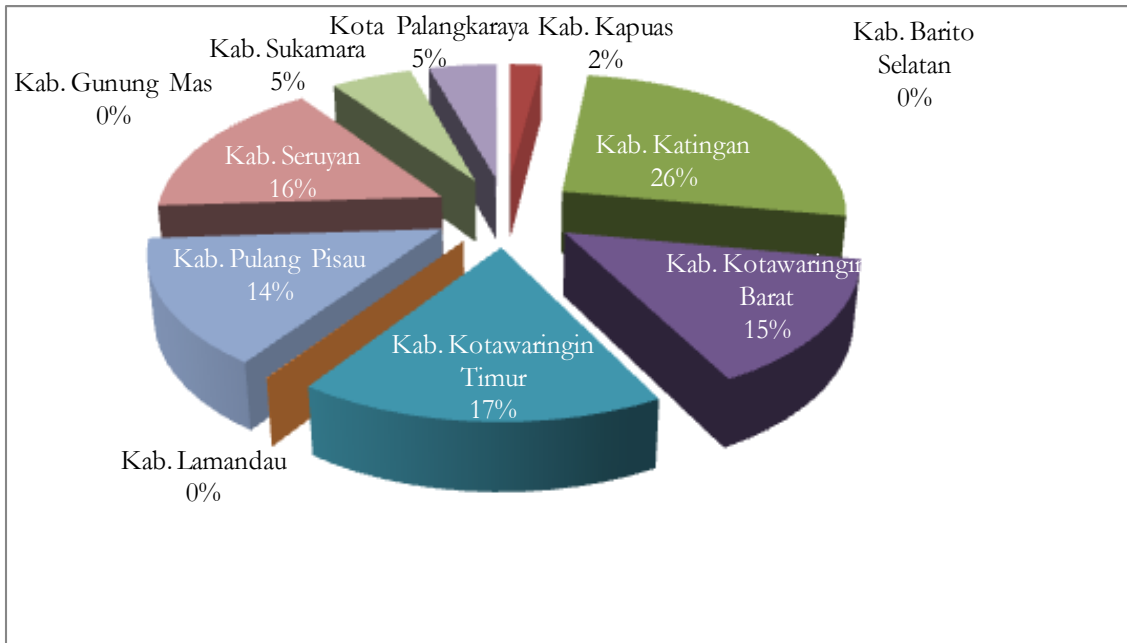


Diagram 8. Presentase sebaran kawasan bergambut di Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 11.
Pertumbuhan ramin di Provinsi Kalimantan Barat

Sebagian kawasan bergambut di Kalimantan Tengah berada di wilayah kerja BPDAS Kahayan Eks Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare dengan luas sekitar 1.457.100 ha yang terbagi menjadi beberapa blok. Kawasan ini sebelumnya merupakan habitat asli ramin. Berdasarkan wilayah

administrasinya, kawasan Eks PLG terbagi dalam 4 kabupaten/kota yaitu Kota Palangkaraya (± 16.558 ha), Kabupaten Pulang Pisau (± 16.558 ha), Kabupaten Barito Selatan (± 218.757 ha) dan Kabupaten Kapuas (± 619.082 ha).

Sebagian kawasan bergambut di Kalimantan Tengah yang terletak di Kabupaten Kapuas ditetapkan sebagai wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan lindung (KPHL) Model Kapuas sesuai dengan Keputusan Menhut Nomor SK.247/Menhut-II/2011 tanggal 02 Mei 2011 seluas ± 105.372 ha yang merupakan hutan lindung (HL). Di kawasan gambut ini, ramin banyak ditemukan di ketinggian tempat kurang dari 300 m di atas permukaan laut, dengan intensitas cahaya 35 % - 65 %. Dengan intensitas cahaya seperti tersebut ramin dapat tumbuh dengan baik, tumbuh dalam bentuk koloni dan tidak jauh dari pohon induknya.

IV. LOKASI POTENSIAL DAN AREAL YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK REHABILITASI RAMIN



Seperti disampaikan di bagian terdahulu bahwa penentuan lokasi yang direkomendasikan untuk penanaman kembali ramin adalah berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain status lahan (kawasan), kesesuaian lahan berdasarkan sejarah vegetasi yang ada, aksesibilitas atau kemudahan untuk mencapai lokasi dan keamanan. Penanaman kembali ramin juga membutuhkan usaha (*effort*) secara terus menerus yang membutuhkan waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu dukungan instansi, khususnya instansi di wilayah tersebut juga sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan jangka panjang. Pada tahap-tahap awal pertumbuhan ramin membutuhkan pemeliharaan intensif dan pemupukan, sehingga aksesibilitas dan ketersediaan tenaga kerja juga sangat diperlukan.

Lokasi-lokasi potensial untuk penanaman kembali ramin adalah lokasi-lokasi yang sesuai namun memerlukan beberapa prasyarat untuk penanaman kembali ramin, sehingga lokasi tersebut dianggap potensial namun dapat direkomendasikan setelah hambatan-hambatan konflik, kebakaran hutan dan lahan dan lain-lain dapat diatasi.

Pertumbuhan ramin sangat lambat, yakni rata-rata hanya 0,42 cm per tahun, maka diperlukan waktu sekitar 80-100 tahun untuk mencapai diameter batang sekitar 50 cm. Untuk mengawal pertumbuhan yang lambat tersebut, komitmen pemerintah dan jaminan pendanaan mutlak diperlukan dan tidak akan dapat digantikan oleh peran swasta yang umumnya hanya berorientasi jangka pendek dan keuntungan.

4.1. Areal Potensial untuk Rehabilitasi Ramin di Sumatera

Dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang dianggap penting seperti disebutkan sebelumnya, lokasi untuk rehabilitasi habitat dan penanaman kembali ramin, diperoleh beberapa lokasi potensial di Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan.

4.1.1. Provinsi Riau

Suaka Marga Satwa Giam Siak Kecil-Bukit Batu (bagian dari CB GSKBB)

Lokasi ini terletak di Kabupaten Siak dengan luas areal mencapai 50.000 ha, terletak di 0° 00' LU – 01°22' LU dan 101°24' - 102°53' BT (SM ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Riau Nomor SK. Gubernur KDH Tk. I Riau No. 324/XI/1983 Tanggal 3 November 1983). Aksesibilitas relatif tinggi, mudah dicapai dengan jalan darat dengan waktu tempuh sekitar 1-2 jam dari Pekanbaru. Berdasarkan informasi yang ada, saat ini di kawasan tersebut masih terdapat populasi ramin. Kawasan Giam Siak Kecil merupakan kawasan konservasi, namun di dalam kawasan terdapat enclave pemukiman penduduk yang dapat menimbulkan resiko terjadinya konflik dengan masyarakat. Sekitar tiga (3) tahun yang lalu, 200 ha dari 400 ha areal rehabilitasi yang telah dibangun dan diprakarsai oleh BKSDA dibakar masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Meranti

Lokasi ini termasuk dalam kabupaten yang dinilai memiliki komitmen yang tinggi dalam perbaikan lingkungan dan pelestarian sumberdaya hutan. Kabupaten ini memiliki kawasan bergambut dengan kondisi kritis yang cukup luas. Aksesibilitas relatif sedang dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan jarak tempuh sekitar 7 jam ataupun dapat ditempuh dengan perahu. Waktu tempuh dapat diperpendek dengan menggunakan jalur lain atau dengan perahu cepat (*speedboat*).

Daerah Rokan Hilir (Wilayah PT. DRT)

Lokasi ini merupakan areal konsesi PT. Diamond Raya Timber. Aksesibilitas relatif tinggi, waktu tempuh sekitar 3-5 jam dari Pekanbaru melalui jalur darat. Dari berbagai informasi, daerah ini merupakan habitat terluas ramin di provinsi Riau. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi berbagai konflik, terutama antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya terkait kasus perambahan dan pembalakan liar.

Desa Rantau Baru dan wilayah Kelurahan Pelalawan (Wilayah PT. RAPP)

Lokasi ini merupakan areal konsesi PT. RAPP, di sepanjang koridor jalan masuk ke areal RAPP. Aksesibilitas relatif tinggi, kondisi jalan baik dan waktu tempuh ke lokasi sekitar 2 jam. Areal ini memanjang di kiri-kanan jalan. Luas yang ada diperkirakan mencapai puluhan hektar. Kondisi terbuka atau sebagian besar ditutupi oleh vegetasi berupa semak-semak.

Kawasan Taman Nasional Zamrud (Suaka Margastawa Danau Pulau Besar Danau Bawah)

Lokasi ini merupakan kawasan konservasi (Suaka Margastawa) dan masih dalam proses menjadi taman nasional. Terletak di Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan ditunjuk melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK. Mentan No. 846/UM/II/1980 tanggal 25 November 1980. Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor SK. Menhutbun No. 668/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999. Luas areal sekitar 120.000 ha dan terletak di $0^{\circ} 10' \text{ LU} - 0^{\circ} 10' \text{ LS}$ dan $102^{\circ} 40' - 102^{\circ} 06' \text{ BT}$. Menurut informasi yang ada daerah ini juga termasuk habitat ramin.

Kawasan Taman Nasional Tesso Nillo

Lokasi ini merupakan kawasan konservasi yang sangat mudah dicapai dari Pekanbaru. Luas areal 38.576 ha, berlokasi di antara kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu waktu tempuh kira-kira 2 jam perjalanan dengan kondisi jalan yang baik dan merupakan lokasi yang potensial untuk rehabilitasi dan penanaman kembali ramin. Namun kondisi areal ini saat ini sangat memprihatinkan, karena berdasarkan survei terakhir (oleh WWF pada 2011), kawasan hutan yang ada di taman nasional ini sudah berubah menjadi kebun kelapa sawit mencapai 15.714 ha. Pembalakan liar yang sudah berlangsung juga mengakibatkan 1.534 ha dari areal tersebut telah menjadi hutan gundul dan 3.846 ha sudah menjadi semak belukar. Sedangkan, alih fungsi menjadi kebun karet mencapai 328 ha dan penggunaan untuk fungsi lainnya seluas 34 ha.

Suaka Margasatwa Kerumutan

Suaka Margasatwa ini ditunjuk melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK. Mentan No. 350/Kpts/II/6/1979 tanggal 6 Juni 1979). Luas areal sekitar 120.000 ha dan terletak di 0° 10' LU – 0°10' LS dan 102°40'-102°06' BT. Terletak di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir. Aksesibilitas ke kawasan ini relatif tinggi, waktu tempuh sekitar 3-4 jam dari Pekanbaru. Kawasan konservasi inipun termasuk rawan terhadap pembalakan liar dan perambahan.

Kawasan Hutan Wisata Sungai Dumai

Kawasan ini terletak di dekat kota Dumai dengan luas awal 4.712,5 ha namun saat ini hanya tersisa 1.700 ha akibat adanya pembalakan liar, berada di jalan utama dari Pekanbaru menuju kota Dumai dengan tingkat aksesibilitas yang sangat tinggi. Waktu tempuh dari Pekanbaru sekitar 5 – 6 jam atau hanya sekitar setengah jam dari kota Dumai.

4.1.2. Provinsi Jambi

Taman Hutan Raya (Tahura) Sekitar Tanjung

Kawasan ini berada di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pengelolaan Tahura berada di bawah koordinasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Luas Tahura diperkirakan sekitar 20.860 ha dengan kondisi lahan kritis seluas 18,660 ha, di mana 10.000 ha dari luas tersebut berada dalam kondisi sangat kritis (tidak ada tegakan, hanya semak belukar) setelah mengalami 3 x kebakaran, yaitu pada tahun 1997, tahun 2007 dan tahun 2011. Aksesibilitas relatif tinggi, dapat ditempuh dengan (1) Menggunakan kendaraan bermotor (mobil *double gardan*) selama 2 jam perjalanan dengan melintasi areal Perkebunan Sawit PT Bukit Bintang Sawit. Sementara untuk mencapai pondok kerja Tahura masih harus menggunakan perahu klotok selama \pm 30 menit. Kondisi jalan masuk (\pm 5 km) hanya dapat dilewati apabila lahan kering dan sangat tergantung pada ijin dari pihak Perkebunan. (2)

Menggunakan kendaraan bermotor (mobil) selama 2 jam dan 1 jam menggunakan perahu klotok.

Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Buluh

Kawasan ini terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan total luas 17,721 ha yang berada di wilayah kecamatan Mendahara Ulu seluas 12,476 ha dan Kecamatan Geragai seluas 5,245 ha (Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor SK No, 108 tahun 1999 tanggal 7 April 1999 dan SK Menteri Kehutanan No. 421/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999). Areal HLG ini merupakan areal eks HPH Heitching dan pernah mengalami kebakaran pada tahun 1997. Penanaman dengan beberapa jenis pohon lokal pernah dilakukan pada tahun 2003 yang merupakan program Dinas Kehutanan. Dua jenis pohon yang ditanam yaitu jelutung dan meranti rawa. Aksesibilitas relatif tinggi dan berada di tepi jalan raya dan perusahaan minyak PT. Petrochina International Jabung (Petrochina). Dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor (mobil) selama 1,5 - 2 jam dari Jambi. Lokasinya berdekatan dengan perkebunan sawit, PT WKS (HTI) dan Petrochina. Disepanjang areal HLG ini juga terdapat pipa-pipa minyak milik Petrochina.

Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Londerang

Kawasan ini terletak di dua kabupaten, yaitu Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi dan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor SK No, 108 tahun 1999 tanggal 7 April 1999 dan SK Menteri Kehutanan No. 421/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999. HLG Sungai Londerang memiliki luas sekitar 11.080,49 ha. Sebagian terletak di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 6.027,49 ha dan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi seluas 5,053 ha. Areal HLG ini merupakan areal bekas kebakaran dengan vegetasi yang tersisa saat ini adalah semak belukar. HLG Sungai Londerang ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor (mobil) selama 1,5 - 2 jam dari Jambi dan menggunakan klotok atau perahu selama \pm 0,5 – 1 jam. Di areal ini terdapat program Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang merupakan program rehabilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menanam Jelutung di tengah tanaman sawit.

4.1.3. Provinsi Sumatera Selatan

Hutan Produksi Terbatas (HPT) Padamaran

Kawasan ini terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Luas areal sekitar 9.700 ha. Areal ini merupakan areal atau habitat ramin. Areal ini mengalami kebakaran tahun 1997-1998 dan sekitar tahun 2004. Vegetasi yang tersisa saat ini adalah semak belukar sampai dengan hutan sekunder dengan berbagai vegetasi hutan rawa gambut. Areal dikelilingi oleh perkebunan sawit. Aksesibilitas relatif tinggi melewati jalan perkebunan dengan waktu tempuh 1,5 - 2 jam dari Kota Kayu Agung dan 3 - 4 jam dari kota Palembang. Penanaman kembali dengan ramin dan beberapa jenis hutan rawa gambut sudah pernah dilakukan dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. HPT Padamaran secara teknis dikelola oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Ancaman kebakaran pada tingkat rendah sampai sedang dan ancaman perambahan cukup tinggi kecuali telah dikelola secara intensif.

4.2. Areal Potensial untuk Rehabilitasi Ramin di Kalimantan

4.2.1. Provinsi Kalimantan Barat

Hutan Kota Sungai Raya

Hutan Kota Sungai Raya berada di Kabupaten Kubu Raya, dengan pengelolaan di bawah koordinasi Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya. Areal hutan kota ini berstatus APL Lindung yang berubah fungsi sebagai hutan kota berdasarkan SK Bupati No. 304 Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011. Hutan Kota Sungai Raya ini memiliki total luas 25 ha yang berada di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya. Secara administratif terletak di Kabupaten Kuburaya. Kawasan hutan kota ini dulunya merupakan salah satu areal penghasil kayu ramin di Provinsi Kalimantan Barat dengan kedalaman gambut mencapai 5 meter. Kawasan ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor terutama kendaraan roda dua. Jarak tempuh dari Kota Pontianak ke Kabupaten Kuburaya sekitar 30 - 45 menit. Dari tepi jalan raya menuju Desa Limbung berjarak sekitar 2 km yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 30 menit dengan jalan berbeton, dan dari Desa Limbung menuju hutan kota berjarak

sekitar 3 km dengan jalan setapak dari gambut yang ditempuh selama 30 – 45 menit. Lokasi Hutan Kota Sungai Raya berada tepat di belakang bandar udara Supadio, Pontianak. Dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap kegiatan penanaman kembali di areal ini dan adanya kawasan hutan kota sangat baik dan cukup aman dari bahaya kebakaran.

Hutan Lindung Sungai Paduan

Hutan Lindung Sungai Paduan secara administratif terletak di Kabupaten Kayong Utara. Kawasan hutan lindung ini juga merupakan salah satu habitat ramin dengan kedalaman gambut mencapai 6 meter. Total waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi ini dari Pontianak sekitar 10 jam perjalanan. Dari Pontianak ke Kabupaten Kayong Utara dapat ditempuh dengan jalan darat dalam waktu 5 – 6 jam, dilanjutkan dengan menggunakan perahu/*speed boat* selama 2 jam perjalanan. Hutan lindung ini memiliki habitat hutan sekunder dengan kerapatan sedang dan beberapa lokasi sudah berubah menjadi padang ilalang dan semak belukar. Dukungan pemerintah untuk kegiatan rehabilitasi di lokasi ini cukup baik, namun cukup rawan dengan ancaman kebakaran.

Cagar Alam Mandor

Cagar Alam Mandor ditunjuk melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor No. 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982. Luas areal sekitar 3.080 ha terletak di 00°15' - 00°20' LU dan 109°18'-109°23' BT yang secara administratif terletak di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Tipe ekosistem yang terdapat di kawasan ini adalah hutan rawa gambut, hutan hujan dataran rendah dan hutan kerangas. Ramin merupakan salah satu potensi flora di kawasan konservasi ini. Aksesibilitas ke kawasan ini relatif mudah, membutuhkan waktu sekitar 2 jam dengan jalan darat dari Pontianak menuju Kecamatan Mandor. Dari Kecamatan Mandor menuju kawasan cagar alam membutuhkan waktu sekitar 30 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Saat ini ekosistem di kawasan Cagar Alam Mandor terancam oleh kegiatan Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) yang berlangsung sejak tahun 2000. Diperkirakan sekitar 30% dari kawasan ini telah berubah menjadi lahan terbuka dan hamparan pasir bekas penambangan yang menggunakan mesin

mekanis. Pemerintah setempat telah melakukan kegiatan rehabilitasi dan reboisasi di sebagian kawasan tersebut dan mencegah pembukaan tambang baru untuk mengurangi kerusakan yang lebih parah.

Taman Nasional Gunung Palung

Taman Nasional Gunung Palung ditunjuk melalui Surat Pernyataan dari Menteri Kehutanan No. 448/Menhut/V/1990 tanggal 6 Maret 1990 dan diperkuat melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 352/Kpts-II/1994 tanggal 23 Agustus 1994. Luas Taman Nasional sekitar 90.000 ha dan terletak di antara 01° 03' - 01 °22' Lintang Selatan dan 109° 54' - 110° 28' Bujur Timur, membentang di 2 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Propinsi Kalimantan Barat. Tipe ekosistem di kawasan ini cukup kompleks yaitu hutan mangrove di pesisir pantai, hutan rawa gambut dan rawa air tawar di dataran rendah, dan ekosistem dataran tinggi dan hutan pegunungan yang selalu ditutupi kabut. Ramin (*Gonystylus bancanus*) juga merupakan salah satu jenis potensial di kawasan taman nasional ini. Aksesibilitas ke kawasan ini dapat ditempuh melalui beberapa jalur, yaitu Pontianak - Ketapang dengan pesawat terbang selama 1,5 jam, *express boat* selama 6 jam, atau jalur darat selama 12 jam. Kemudian menuju Sukadana atau Teluk Melano menggunakan kendaraan roda 4 selama sekitar 2 jam. Cara lain adalah menggunakan *speedboat* dari Pontianak menuju Teluk Melano - Sukadana selama sekitar 4 jam melalui Rasau Jaya atau menggunakan *speedboat* dari Pontianak – Sukadana sekitar 4,5 jam.

Kondisi taman nasional ini secara keseluruhan sangat memprihatinkan dan semakin memburuk akibat penebangan secara liar. Beberapa penelitian dan inisiatif konservasi telah banyak dilakukan baik oleh lembaga nasional maupun internasional untuk menghambat laju deforestasi dan mengurangi tekanan terhadap kawasan ini.

4.2.2. Provinsi Kalimantan Tengah

Taman Nasional Sebangau

Lokasi ini terletak dekat dengan Kota Palangkaraya, sekitar 30 menit dengan kendaraan bermotor dan kemudian dilanjutkan dengan *speedboat* selama sekitar

30 menit. Taman nasional ini sebelumnya merupakan areal bekas beberapa HPH yang kemudian pada tahun 2004 ditetapkan menjadi taman nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK 423/Menhut-II/2004), tanggal 14 Oktober 2004. Taman nasional ini memiliki luas 568.700 ha dan terletak di antara Sungai Sebangau dan Sungai Katingan dan berada pada Wilayah Administrasi Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya. Lokasi berbatasan langsung dengan Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar (eks PLG). Taman nasional Sebangau merupakan habitat utama ramin di Kalimantan dan diperkirakan masih terdapat populasi ramin dengan jumlah yang cukup banyak. Apabila pembalakan liar dapat dihentikan, maka di tempat ini dapat dijadikan sebagai sumber plasma nutfah ramin. Beberapa kegiatan yang berhubungan dengan konservasi plasma ramin sudah dilakukan antara lain (1) Penanaman ramin dari cabutan kerjasama antara TN. Sebangau, BPK Banjarbaru dengan ITTO-CITES di dua lokasi, yaitu lokasi eks HPH PT. Subentra Sebangau Indah (eks PT SSI) dengan luas 2 ha (SSI) dan lokasi ASDG dengan luas 3 ha (ASDG). Pertumbuhan ramin di lokasi eks-SSI dengan persen jadi yang sangat rendah dan bahkan semuanya mati dan hanya di lokasi ADG yang relatif baik dengan persentase hidup sebesar 57 % dari 2.050 bibit yang ditanam di lokasi ASDG.

Taman Nasional Tanjung Puting

Taman Nasional Tanjung Puting adalah sebuah taman nasional yang terletak di semenanjung barat daya provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis terletak antara 2°35'-3°20' LS dan 111°50'-112°15' BT meliputi wilayah kecamatan Kumai di Kotawaringin Barat dan di kecamatan Hanau serta Seruyan Hilir di Kabupaten Seruyan. Lokasi ini membutuhkan waktu sekitar 3-5 jam dari Kota Palangkaraya dengan menggunakan kendaraan bermotor, kemudian dilanjutkan dengan *speedboat* 1-2 jam. Taman Nasional Tanjung Puting dikelola oleh Balai Taman Nasional Tanjung Puting, sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan. Kemudian, pada tahun 1984 kawasan tersebut ditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 096/Kpts-II/84 tanggal 12 Mei 1984.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 45/Kpts/IV-Sek/84 tanggal 11 Desember 1984 wilayah

kerja Taman Nasional Tanjung Puting ditetapkan meliputi areal Suaka Margasatwa Tanjung Puting dengan luas kawasan 300.040 ha. Pada tahun 1996, melalui SK Menteri Kehutanan No. 687/kpts-II/96 tanggal 25 Oktober 1996, luas kawasan Taman Nasional Tanjung Puting bertambah menjadi 415.040 ha yang terdiri atas Suaka Margasatwa Tanjung Puting 300.040 ha, hutan produksi 90.000 ha (*ex. PT. Hesubazah*), dan kawasan daerah perairan sekitar 25.000 ha.

Taman Nasional ini memiliki beberapa tipe ekosistem, yaitu hutan tropika dataran rendah, hutan tanah kering (hutan kerangas), hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, hutan bakau atau mangrove, hutan pantai dan hutan sekunder.

Kawasan Eks PLG

Lokasi ini relatif dekat dari Kota Palangkaraya. Waktu tempuh untuk mencapai lokasi ini bervariasi tergantung posisi yang akan dikunjungi dari kawasan, sekitar 1- 4 jam dengan menggunakan kendaraan roda dua ataupun empat. Berbagai kerjasama dalam dan luar negeri telah banyak dilakukan untuk merehabilitasi dan restorasi eks-PLG ini, sehingga tidak disampaikan lagi di dalam laporan ini.

Suaka Margasatwa Lamandau

Suaka Margasatwa Lamandau berada di 111°11' - 111°30' BT dan 2°33' - 2°53' LS pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang termasuk ke dalam 4 (empat) kecamatan yang terbagi dalam 2 (dua) kabupaten yaitu: Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat serta Kecamatan Jelai dan Kecamatan Sukamara di Kabupaten Sukamara. Untuk mencapai lokasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 3-5 jam dari Kota Palangkaraya. Suaka margasatwa ini memiliki luas \pm 76.110 ha dengan dasar penunjukan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 162/Kpts-II/1998 tanggal 26 Februari 1998. Kondisinya relatif masih baik bila dibandingkan dengan kawasan konservasi lainnya karena jauh dari pemukiman dan daerah industri. Walaupun demikian, 2 tahun terakhir ini, di beberapa titik yang berdekatan dengan jalan mulai mengalami perambahan dan pembalakan liar.

V. AREAL YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK REHABILITASI RAMIN



Penetapan lokasi yang direkomendasikan untuk rehabilitasi dan penanaman kembali ramin dilakukan dengan mencermati status kawasan, kesesuaian lahan, aksesibilitas, jaminan keamanan, tingkat kerusakan serta dukungan pemerintah daerah. Dengan menggunakan kriteria-kriteria tersebut beberapa lokasi dianggap memenuhi untuk direkomendasikan sebagai lokasi penanaman kembali ramin yang memungkinkan dapat dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan dengan risiko yang paling kecil. Namun detail pelaksanaan penanaman kembali ramin di lokasi-lokasi tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut sehingga keberhasilan kegiatan dapat diprediksi.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa deforesiasi dan degradasi hutan rawa gambut sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain yang dipengaruhi oleh penyebab awal, kemampuan untuk pulih dan kondisi terkini. Pada awalnya sebagian besar kawasan hutan rawa gambut adalah habitat yang ideal untuk ramin. Namun dengan perubahan ekosistem tersebut kesesuaian lahan kemungkinan dapat berubah dan mungkin sudah tidak cocok lagi untuk penanaman kembali ramin. Sebagai contoh hutan rawa gambut yang telah mengalami kebakaran berulang kali atau yang sudah mengalami subsidensi akibat kanalisasi diduga telah berubah dan menjadi tidak sesuai untuk penanaman kembali ramin. Ekosistem hutan rawa gambut yang ditumbuhi oleh kelakai (pakis) dan pohon merapat dan gelam di tempat terbuka tidak dapat langsung ditanami ramin, melainkan perlu pengkondisian terlebih dahulu.

Sebaliknya untuk hutan rawa gambut sekunder dengan vegetasi yang relatif baik dapat langsung ditanami ramin. Permasalahan-permasalahan teknis seputar penanaman kembali ramin masih banyak, termasuk pemeliharaannya. Sehingga untuk rekomendasi lokasi penanaman kembali dengan ramin faktor kelembagaan dan/mekanisme pengelolaan tanaman menjadi sangat penting. Karena program penanaman ramin berjangka panjang, komitmen Pemerintah pusat dan daerah perlu dibangun. Pemerintah harus mengambil alih kegiatan seperti ini dan mendorong pihak swasta untuk berperan aktif.

Penyebab utama (*direct drivers*) deforestasi dan degradasi hutan adalah konversi lahan untuk perkebunan, pertanian, pertambangan, pembalakan liar dan kebakaran hutan. Masing-masing penyebab kerusakan tersebut dapat mengubah kondisi gambut yang mungkin dapat merubah tingkat kesesuaian

apabila ditanam kembali dengan ramin. Hutan rawa gambut yang semula merupakan habitat ramin memerlukan perlakuan khusus agar sesuai untuk ditanam kembali dengan jenis yang sama.

Status dan kepastian lahan untuk jangka panjang juga merupakan hal yang krusial. Hal ini terutama disebabkan beberapa daerah di Pulau Sumatera dan Kalimantan ditetapkan sebagai koridor ekonomi untuk kelapa sawit, karet dan energi (batubara dan minyak).

5.1. Pulau Sumatera

5.1.1. Provinsi Riau

Hutan Wisata Sungai Dumai

Status lokasi (areal)	: Hutan Wisata
Pengelola	: Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten Dumai
Letak geografis	: Sekitar Dumai
Luas areal	: 1.700 ha
Aksesibilitas	: Jalan raya Provinsi Riau (Pekanbaru-Dumai)
Jarak Tempuh	: 5 – 6 jam dari Pekanbaru, 30 menit dari Dumai.
Areal sekitar (perbatasan)	: Perkebunan sawit
Kondisi areal	: Terbuka, belukar dan hutan sekunder
Sejarah vegetasi	: Habitat ramin dengan gambut dalam
Program rehabilitasi	: Dinhut Provinsi/BPDAS-PS
Ancaman kebakaran	: Sedang, tetapi mobilitas tinggi
Dukungan Pemerintah	: Sedang
Pola tanam	: Tanam baru dan tanam pengayaan

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Lubuk Sakat, Kampar

Status lokasi (areal)	: Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)
Pengelola	: Balai Litbanghut Kuok, Dinhut Provinsi Riau.
Letak geografis	: Kabupaten Kampar, Riau

Luas areal	: Sekitar 200 ha (dari >1.000 ha)
Aksesibilitas	: Jalan raya Provinsi/kabupaten Kampar
Jarak Tempuh	: 20-30 km dari Pekanbaru, sekitar 1 jam dari Pekanbaru
Areal sekitar (perbatasan)	: Perkebunan sawit
Kondisi areal	: Terbuka, belukar dan hutan sekunder dan Sawit liar
Sejarah vegetasi	: Habitat ramin dengan gambut >2 m
Program rehabilitasi	: Dinhut Provinsi/BPDAS, Litbang
Ancaman	: Sedang, perambahan/pembalakan liar
Dukungan Pemerintah	: Sedang-baik
Pola tanam	: Tanam baru, tanaman campuran

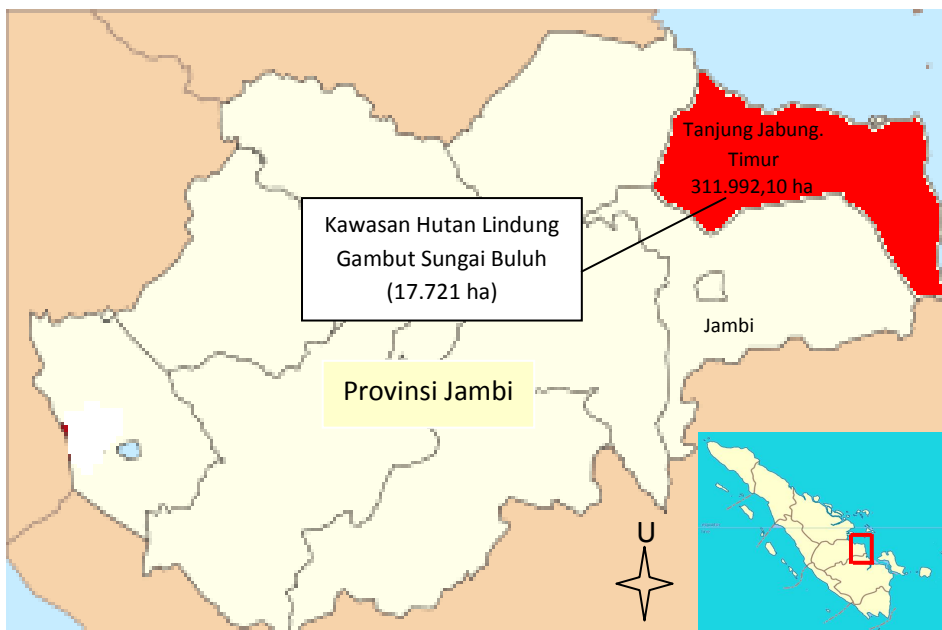


Gambar 12. Lokasi yang direkomendasi untuk penanaman kembali ramin di Provinsi Riau

5.1.2. Provinsi Jambi

Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Buluh

Status lokasi (areal)	: Hutan Lindung
Pengelola	: Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Letak geografis	: Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Luas areal	: 17,721 ha
Aksesibilitas	: Jalan raya Kabupaten
Jarak Tempuh dari Jambi	: 1,5 - 2 jam (sepeda motor/mobil).
Areal sekitar (perbatasan)	: Perkebunan sawit, PT WKS (HTI) dan Petrochina Int. Jabung
Kondisi areal	: Terbuka, belukar dan hutan sekunder
Sejarah vegetasi	: Habitat ramin dengan gambut dalam
Program rehabilitasi	: Dinhut Provinsi/BPDAS-PS
Ancaman kebakaran	: Rendah
Dukungan Pemerintah	: Baik, Dinhut Provinsi dan Dinhut Kabupaten
Pola tanam	: Tanam baru dan tanaman pengayaan

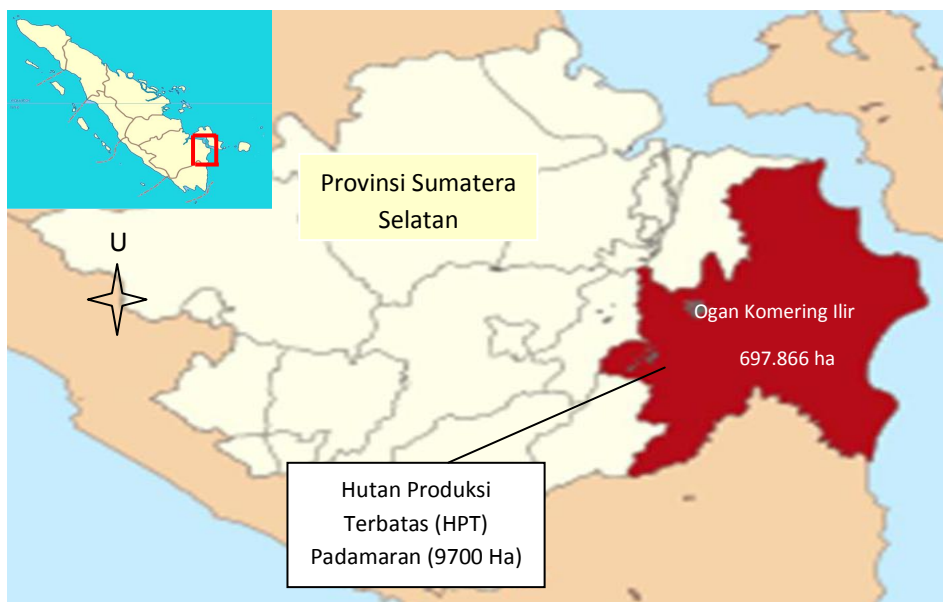


Gambar 13. Lokasi yang direkomendasi untuk penanaman kembali ramin di Provinsi Jambi

5.1.3. Provinsi Sumatera Selatan

Hutan Produksi Terbatas (HPT) Padamaran

Status lokasi (areal)	: Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Pengelola	: Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten
Letak geografis	: Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Luas areal	: 9,700 ha
Aksesibilitas	: Jalan raya Kabupaten
Jarak Tempuh dari Jambi	: 1,5 - 2 jam (sepeda motor/mobil) dari Kayu Agung.
Areal sekitar (perbatasan)	: Perkebunan sawit,
Kondisi areal	: Terbuka, belukar dan hutan sekunder
Sejarah vegetasi	: Habitat ramin dengan gambut dalam
Program rehabilitasi	: Dinhut Provinsi/BPDAS-PS
Ancaman kebakaran	: Sedang sampai tinggi
Dukungan Pemerintah	: Sedang, Dinhut Provinsi dan Dinhut Kabupaten
Pola tanam	: Tanam baru dan tanaman pengayaan



Gambar 14. Lokasi yang direkomendasikan untuk penanaman kembali ramin di Provinsi Sumatera Selatan

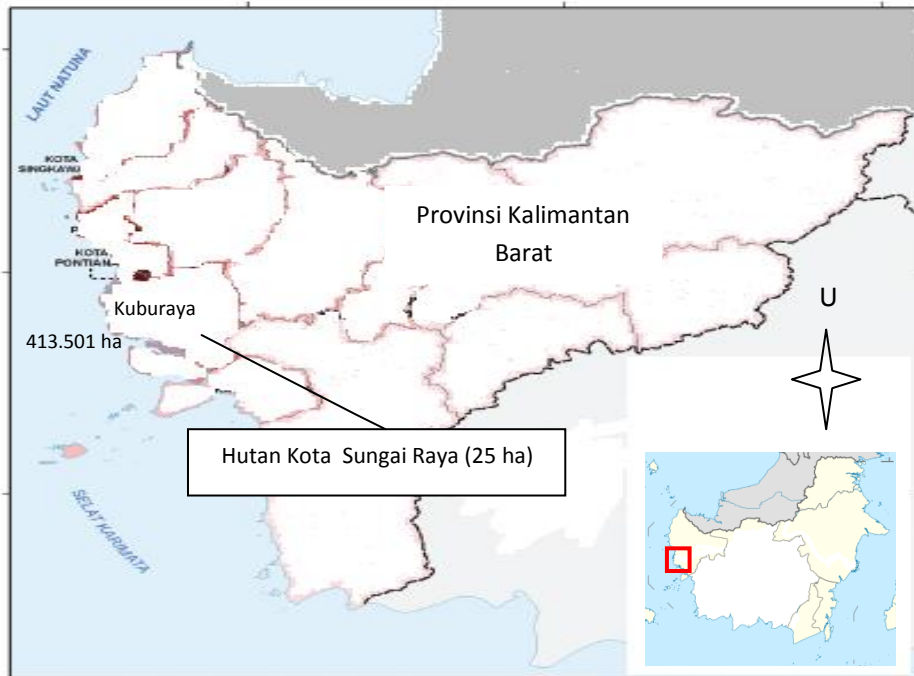
5.2. Pulau Kalimantan

Penetapan lokasi yang akan direkomendasikan untuk rehabilitasi ramin sedapat mungkin memenuhi beberapa kriteria yang menjadi acuan adalah status kawasan, kesesuaian lahan, aksesibilitas, jaminan keamanan, tingkat kerusakan serta dukungan pemerintah daerah. Dengan kriteria-kriteria tersebut lokasi yang direkomendasikan dapat dijadikan sebagai lokasi penanaman kembali ramin.

5.2.1. Kalimantan Barat

Hutan Kota Sungai Raya

Status lokasi (areal)	: Hutan kota
Pengelola	: Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kubu Raya
Letak geografis	: Sekitar Pontianak
Luas areal	: 25 ha
Aksesibilitas	: Jalan raya dalam kota Pontianak
Jarak Tempuh	: 30 menit dari Pontianak.
Areal sekitar (perbatasan)	: Pemukiman dan bandara.
Kondisi areal	: Terbuka, belukar dan hutan sekunder
Sejarah vegetasi	: Habitat ramin dengan gambut dalam
Program rehabilitasi	: Dintanhutbang, BPDAS Kapuas
Ancaman kebakaran	: Sedang, tetapi mobilitas tinggi
Dukungan Pemerintah	: Sedang
Pola tanam	: Tanam baru dan tanaman pengayaan



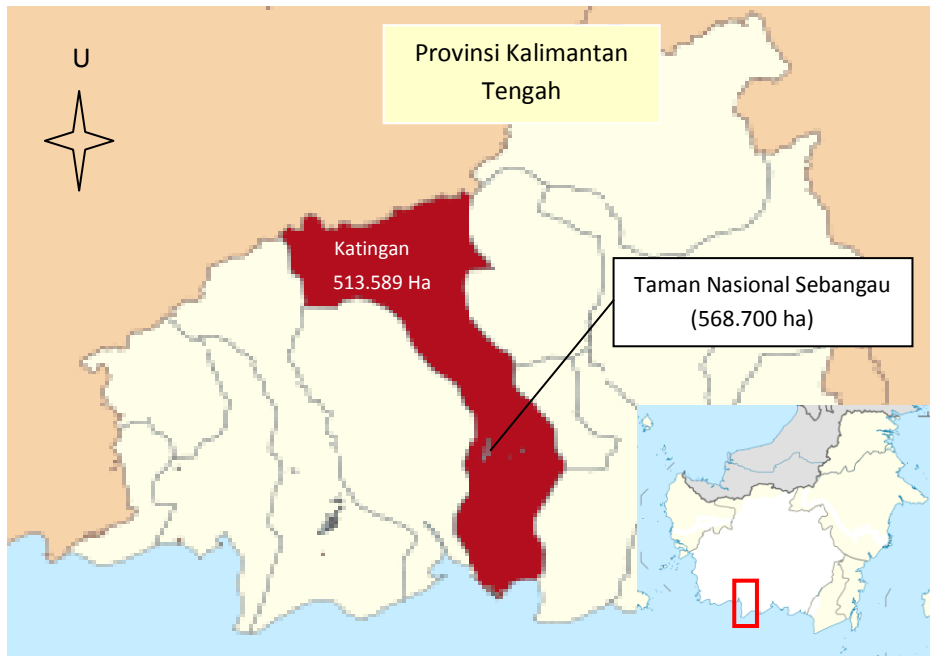
Gambar 15. Lokasi yang direkomendasi untuk penanaman kembali ramin di Provinsi Kalimantan Barat

5.2.2. Kalimantan Tengah

Taman Nasional Sebangau

Status lokasi (areal)	: Taman Nasional
Pengelola	: Balai Taman Nasional
Letak geografis	: Sekitar Palangkaraya, Katingan, Pulang Pisau
Luas areal	: 568,700 ha
Aksesibilitas	: Jalan raya dan sungai
Jarak Tempuh	: 30 menit dari Palangkaraya
Areal sekitar (perbatasan)	: Eks- PLG.
Kondisi areal	: Terbuka, belukar dan hutan sekunder
Sejarah vegetasi	: Habitat ramin dengan gambut dalam

Program rehabilitasi : Berbagai program CSR
Ancaman : Kebakaran dan pembalakan liar, sedang
Dukungan Pemerintah : Sedang
Pola tanam : Tanam baru dan tanaman pengayaan



Gambar 16. Lokasi yang direkomendasi untuk penanaman kembali ramin di Provinsi Kalimantan Tengah

DAFTAR PUSTAKA

- Agusrizal. 2013. Taman Hutan Raya (Tahura) Sekitar Tanjung Menjadi Urusan Pemerintah Provinsi Jambi. Presentasi dalam Expose Tahura dalam Temu Perangkat Pemerintah Desa. Dinas Kehutan Provinsi Jambi. (Tidak diterbitkan).
- Anonymous, 2010. Laporan Pendahuluan Kegiatan Identifikasi Kondisi Eksisting Kerusakan Lingkungan Hidup (Kawasan Hutan dan Non Hutan) di Provinsi Riau. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau.
- _____, 2011. Laporan Tahunan 2011. Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
- _____, 2011. Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS pada Kawasan Bergambut Berfungsi Lindung dan Budidaya Wilayah Kerja BPDAS Indragiri Rokan. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Indragiri Rokan. Provinsi Riau.
- _____, 2011. Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTk – RHL) Rawa Gambut SWP DAS DAS Batanghari. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batanghari. Provinsi Jambi.
- _____, 2011. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2031. Pemerintah Provinsi Jambi.
- _____, 2011. Laporan Tahunan 2011. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- _____, 2011. Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS pada Kawasan Bergambut Berfungsi Lindung dan Budidaya Wilayah Kerja BPDAS Kahayan. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kahayan. Provinsi Kalimantan Tengah.
- _____, 2011. Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Rtk-RHL) Rawa Gambut Provinsi Kalimantan Barat. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas. Provinsi Kalimantan Barat.

- _____, 2012. Laporan Tahunan 2012. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- _____, 2012. Statistik Kehutanan Tahun 2012. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- Bastoni. 1999. Uji coba penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan (*enrichment planting*) pada areal bekas tebangan hutan rawa gambut di Sumatera Selatan. (Prosiding Ekspose BTR-P). Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Balai Teknologi Reboisasi Palembang.
- Istomo, T.E. Komar, M.H.L. Tata, E.S.S. Sumbayak dan A. Rahma. 2010. Evaluasi Sistem Silvikultur Hutan Rawa Gambut di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam bekerjasama dengan ITTO. Bogor.
- Komar, T.E. 2005. Konservasi dan Pembangunan Hutan Ramin di Indonesia. Prosiding Semiloka Nasional. Bogor, 28 September 2005. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam bekerjasama dengan ITTO – CITES.
- Komar, T.E. 2011. Peta Jalan Menuju Pengelolaan Ramin (*Gonystylus bancanus*). Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi Hutan-International Tropical Timber Organization.
- Komar, T. E, S. Nurjanah and D. T. Rosita. 2012. The Prevention of Further Loss and The Promotion of Rehabilitation and Plantation of *Gonystylus* spp. (Ramin) In Sumatera and Kalimantan. Ministry of Forestry. Forestry Research and Development Agency in cooperation with International Tropical Timber Organization. Bogor.
- Miettinen, J., Shi, C. and Liew, S.C. 2011. Deforestation Rate In Insular Southeast Asia Between 2000 and 2010. Global Change Biology.
- Soehartono, T and A. Mardiasuti. 2002. CITES Implementation in Indonesia. Nagao Natural Environment Foundation. Jakarta.

Triono, T, B. Yafid, T. Kalima, A. Sumadijaya, A. Kertonegoro, and Sutiyono. 2009. Ministry of Forestry. Forests Research and Development Agency in cooperation with ITTO-CITES Projects. Bogor – 2009.

Wahyunto, S. Ritung dan H. Subagjo. 2005. Sebaran Gambut dan Kandungan Karbon di Sumatera dan Kalimantan. Proyek *Climate Change, Forest and Peatlands in Indonesia*. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada, Bogor.

Diterbitkan oleh:

FORDA PRESS

Jalan Gunung Batu No. 5. Bogor Jawa Barat

Telp. 0251 7520 093

E-mail : fordapress@yahoo.co.id

Bekerjasama dengan :

PUSAT LITBANG KONSERVASI DAN REHABILITASI

Jalan Gunung Batu No. 5. Bogor Jawa Barat

Telp: 0251 8633234, 7520067 Fax: 0251 8638111

dan/dibiayai oleh:

INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION (ITTO)-CITES

Phase-2 Project, 2013

Kehutanan

ISBN 978-602-14274-4-6



9 786021 427446